KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN III TAHUN 2024

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

BPPSDM

BerAKHLAK #2024 KKP BEYOND

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai salah satu Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai media informasi, pertanggungjawaban kinerja serta sebagai alat pengendali menuju terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Laporan kinerja Triwulan III Tahun 2024 ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada Tahun 2024. Perjanjian kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020-2024 dan perwujudan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran.

Selama Triwulan III Tahun 2024, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang dalam dua dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang terdiri perjanjian kinerja dengan Pusat Pelatihan KP terdiri dari 5 sasaran kegiatan dan 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) serta perjanjian kinerja dengan Pusat Penyuluhan KP terdiri dari 3 sasaran kegiatan dan 9 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai target dan realisasi kinerja pada Triwulan III Tahun 2024, keberhasilan/kegagalan program, permasalahan dan solusi serta kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Akhir kata, semoga penyajian Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi pada triwulan III tahun 2024 dan umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja kedepan secara produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, koordinasi pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi.

Ambon, 16 Oktober 2024
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon

Abubakar

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab:

Abubakar S.St.Pi, M.Si

Ketua:

Rahmawati Umasugi S.Pi, M.Si

Sekertaris :

Moh. Arief Hidayat A.Md, S.Pi

Anggota:

Fiona A.B. Nikyuluw S.Pi, M.Si

Wahyu Retno Aris S.St.Pi

Dessy Rompis S.AP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
TIM PENYUSUN iii
DAFTAR ISI iv
IKTISAR EKSEKUTIF.....v

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 5
1.3 Tugas dan Fungsi BPPP Ambon 6
1.4 Keragaan SDM BPPP Ambon..... 9
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....10

BAB II PERENCANAAN KINERJA 15
2.1 Rencana Strategis 15
2.2 Rencana Kerja Tahun 2024 22
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....22
2.4 Pengukuran Kinerja.....25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 28
3.1 Prestasi Kinerja.....28
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja.....29
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....88
3.4 Efisiensi Anggaran 90

BAB IV PENUTUP 92
4.1 Capaian Kinerja Utama.....92
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi.....94
LAMPIRAN

IKTISAR EKSEKUTIF

Sasaran kinerja yang dicapai pada triwulan III tahun 2024 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon yaitu administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan kerjasama, informasi dan dokumentasi ilmiah yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Berdasarkan perjanjian kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dengan Pusat Pelatihan KP yang terdiri dari 5 sasaran kegiatan dan 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) serta perjanjian kinerja dengan Pusat Penyuluhan KP yang terdiri dari 3 sasaran kegiatan dan 9 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari Sasaran Strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 26 (Dua puluh enam) indikator kinerja, yang selanjutnya ditetapkan dalam dua dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan merupakan target kinerja Balai yang harus diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2024.

Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon triwulan III tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key perfomance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja

dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical framework* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Ambon di tingkat korporat triwulan III tahun 2024 sebesar 116,00%.

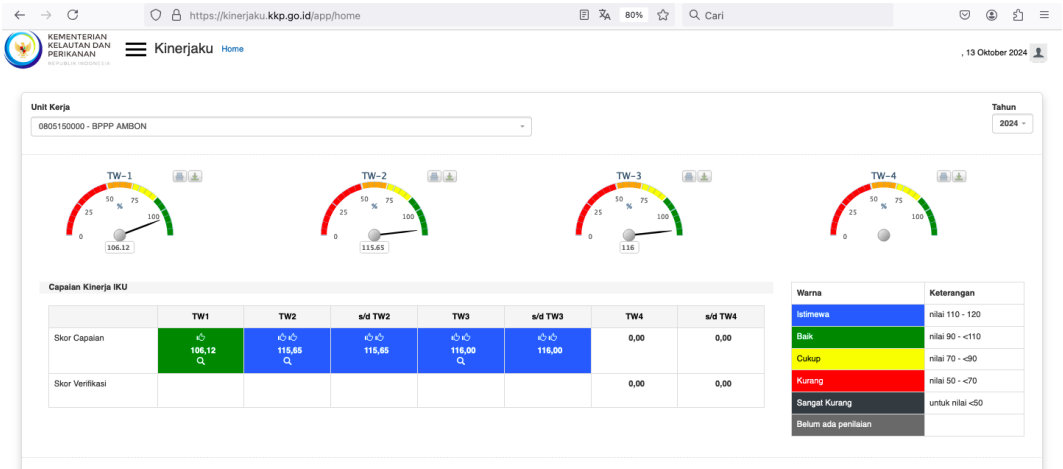

Dashboard Kinerja BPPP Ambon

Selama triwulan III tahun 2024, dari 8 IKU yang menjadi target triwulan III tahun 2024 BPPP Ambon, semua telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja BPPP Ambon Triwulan III Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW 3	REALISASI TW 3	% REALISASI
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	72	0	0	0
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	3.302	2.398	2.540	105,92
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,682	0,20	2,82	120
		4	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Pelatihan Satker BPPP Ambon (Orang)	4	0	0	0
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	5	SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	150	0	0	0
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	6	Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	18	0	0	0
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Jumlah Peyuluh Perikanan PNS yang mengikuti Uji Kompetensi Satker BPPP Ambon (Orang)	2	0	0	0
		8	Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha yang disuluh di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	3.000	2.200	2.835	120
		9	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	90	60	70	116,68
		10	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	240	100	175	120
		11	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Penyuluhan Satker BPPP Ambon (Orang)	370	0	0	0
		12	Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	5	0	0	0
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di Satker BPPP Ambon (Desa)	2	0	0	0
		14	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	2	0	0	0
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	15	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1	0	0	0
		16	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1	0	0	0
7	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	17	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satker BPPP Ambon (Dokumen)	2	0	0	0
		18	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100	75	75,86	101,15

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW 3	REALISASI TW 3	% REALISASI
		19	Nilai Rekonsilasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	94	0	0	0
		20	Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94	94	120,14	120
		21	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	81			
		22	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-R atas LK BPPP Ambon (%)	≤ 0,5	0	0	0
		23	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	82	82	100	120
		24	Penilaian Mandiri SAKIP Satker BPPP Ambon (Nilai)	78	0	0	0
		25	Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran BPPP Ambon (nilai)	93,76	0	0	0
		26	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	82	0	0	0

Keterangan : Nilai capaian maksimal 120%

Secara umum kinerja BPPP Ambon sangat baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap IKU dengan Target Kinerja Tahunan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BPPP Ambon. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPP Ambon. Akhirnya, BPPP Ambon berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional. Visi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005-2025, yaitu "Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional". RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan

menengah atas (*upper-middle income country*/ MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (*society*) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat pada manusia (*human–centered*) serta berbasis teknologi (*technology based*). *Cyber–physical system* (CPS) dalam Industri 4.0 merupakan integrasi antara *physical system*, komputasi dan juga *network* / komunikasi, sedangkan society 5.0 merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi *cyber–physical–human systems*. Pada era *society* 5.0 manusia tidak hanya dijadikan obyek (*passive element*), tetapi berperan aktif sebagai subyek (*active player*) yang bekerja bersama *physical system* dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut, interaksi antara mesin (*physical system*) dan manusia diperlukan untuk menjaga kesimbangan maupun keharmonisan.

Hal utama yang harus dicermati adalah bahwa keberhasilan pembangunan perikanan sangat tergantung pada perubahan perilaku pelaku utama dalam menyikapi tantangan tersebut. Selain peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, penyuluhan perikanan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan perikanan, karena mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan proses alih informasi dan teknologi (*transfer knowledge*) bagi pelaku utama beserta keluarganya serta anggota masyarakat lainnya. Terlebih lagi, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Y Sub Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dimana penyelenggaraan penyuluhan perikanan menjadi kewenangan pusat, sehingga BPPSDM melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sebagai unit satuan kerja harus mampu memainkan peran strategisnya agar penyelenggaraan penyuluhan perikanan dapat berjalan efektif, efisien dan kompeten.

Keberadaan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi KKP melalui:

a. Peningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan secara optimal melalui pelatihan dan sertifikasi;
b. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan;
c. Membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha melalui penumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan koperasi sektor kelautan dan perikanan; serta
d. Meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran melalui diseminasi dan pelatihan.

Untuk memastikan keseluruhan program dan kegiatan pembangunan KP tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan sasarannya, telah disepakati perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Menteri dengan Eselon I dan diturunkan secara berjenjang sampai tingkat individu pegawai, dan telah ditetapkan sampai tingkat daerah (satuan kerja).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Salah satu prinsip dalam tata cara kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan Negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu Instansi Pemerintah atas pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai APBN/ APBD. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada tahun 2024 melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PUSLAT KP dan PUSLUH KP. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program jangka panjang dan

menengah KKP khususnya program pelatihan dan penyuluhan KP sebagaimana tertuang dalam Renstra PUSLAT KP dan PUSLUH KP tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Triwulan III (Juli sampai dengan September) Tahun 2024 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP dan kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan kinerja ini adalah memberikan gambaran kondisi objektif atau profil Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon untuk Triwulan III tahun 2024, perencanaan stategis, target dan capaian kinerja serta evaluasi capaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama dan/atau Penetapan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

1.2 Tujuan

Penyusunan Penyusunan laporan Kinerja (LKj) BPPP Ambon Triwulan III Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dan memenuhi beberapa tujuan, yaitu:

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan dan Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan selaku Pemberi Mandat atas pencapaian Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon selama Triwulan III Tahun 2024.

b. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

1.3 Tugas dan Fungsi BPPP Ambon

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pelatihan dan penyuluhan yang ada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPP Ambon dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pelatihan dan penyuluhan perikanan;
b. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan;
c. Pelatihan teknis dan manajerial dibidang perikanan;
d. Penyusunan materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;
e. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial dibidang perikanan;
f. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;
g. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
h. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta; dan
i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, BPPP Ambon membentuk Struktur Organisasi dan didukung dengan kemampuan sumberdaya manusia perikanan dan sarana prasarana atau fasilitas yang tersedia. Masing-masing bagian mempunyai tugas pokok dan uraian tugas tersendiri. Sub Bagian Umum dengan tugasnya melakukan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan perikanan. Kelompok jabatan fungsional dengan tugasnya memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan funsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/KEPMEN- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, Struktur Organisasi di BPPP Ambon dapat dilihat pada Gambar:

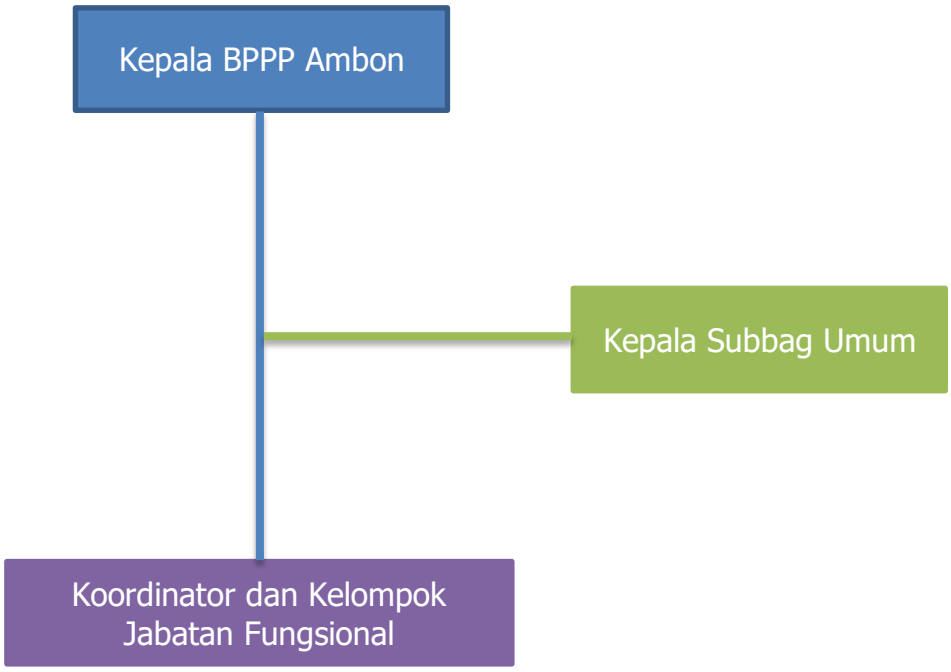

Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Ambon

1.4 Keragaan SDM BPPP Ambon

Jumlah pegawai di BPPP Ambon per 30 September 2024 sebanyak 415 orang dengan rincian komposisi pegawai sebagai berikut :

Tabel 1. Komposisi Pegawai BPPP Ambon

NO	BAGIAN	JUMLAH
1	**Kepala Balai / Eselon III**	1 Orang
2	**Subbag Umum**	0 Orang
	Jabatan Fungsional Umum	20 Orang
	Tenaga Kontrak	26 Orang
3	Jabatan Fungsional Tertentu	
	- Widyaiswara	3 Orang
	- Instruktur	14 Orang
	- Penyuluh	242 Orang
4	Jabatan Fungsional Lainnya	
	- Analis Perencana	1 Orang
	- Analis Kepegawaian	1 Orang
	- Pranata Keuangan APBN Mahir	1 Orang
	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	17 Orang
5	Penyuluh Perikanan Bantu	89 Orang
	Jumlah Total	**415 Orang**

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja (LKj) BPPP Ambon Tahun 2024:

a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

b. PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

c. PP Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara lebih rinci, muatan dokumen LKj ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut :

a. Ikhtisar Eksekutif, menyajikan ringkasan isi laporan kinerja;

b. Bab I – Pendahuluan, Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

c. Bab II – Perencanaan Kinerja, Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023.

d. Bab III –Akuntabilitas Kinerja, Capaian Kinerja Organisasi, Menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

e. Bab IV – Penutup, Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

f. Lampiran, Perjanjian kinerja,

Lampiran yang dianggap perlu.

1.6 Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dibidang kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan kelautan dan perikanan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta riset kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon bertugas melaksanakan kegiatan Pelatihan Kelautan dan Perikanan pada wilayah kerjanya di 9 (sembilan) Provinsi di Indonesia. Wilayah kerja BPPP Ambon yaitu Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Papua

Barat Daya, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan. Kegiatan Pelatihan ditujukan kepada masyarakat kelautan dan perikanan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha di sektor penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

Gambar 2. Wilayah Kerja BPPP Ambon

BPPP Ambon juga membawahi Penyuluh Perikanan pada 8 (delapan) Provinsi meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan. BPPP Ambon bertugas menyiapkan bahan pengembangan penyuluhan dan pelaksanaan penyuluhan, serta penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta.

Gambar 3. Wilayah Satminkal Penyuluhan BPPP Ambon

Keberhasilan pencapaian target ditentukan oleh sumberdaya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Berikut adalah potensi sumberdaya BPPP Ambon dalam mencapai tujuan organisasi :

1) BPPP Ambon berada pada posisi yang sangat strategis di Kota Ambon, tepatnya di Jl. Martha Alfons, Poka, Kecamatan Teluk Ambon. Sebelah selatan berbatasan dengan Pantai Teluk Ambon, sebelah Utara berbatasan dengan Universitas Pattimura, sebalah barat dicapai dengan jalur darat melalui Wayame dan Rumah Tiga, Sebelah Timur dicapai dengan kapal feri penyebarangan Galala-Poka
2) Memiliki *workshop* yang lengkap untuk setiap bidang pelatihan;
3) BPPP Ambon memiliki instalasi budidaya ikan air tawar yang strategis untuk pengembangan budidaya ikan air tawar;
4) Memiliki SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidangnya (3 orang widyaiswara, 14 orang instruktur, 3 orang tenaga teknis/pelatih,

242 orang penyuluh perikanan PNS dan 17 orang PPPK Penyuluh Perikanan serta 89 orang penyuluh perikanan bantu);

5) Sebagian besar SDM BPPP Ambon memiliki usia muda yang produktif;
6) BPPP Ambon tersertifkasi ISO 9001:2015;
7) Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan diklat sesuai manajemen mutu ;
8) Memiliki akreditasi dari Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan untuk menyelenggarakan diklat *Basic Safety Training* (BST);
9) Memiliki akreditasi program pelatihan budidaya ikan hias nemo dan pembesaran ikan kerapu pada KJA dari Lembaga Akreditasi (LA) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
10) Adanya mandat dari Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan kepada BPPP Ambon sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK);
11) BPPP Ambon sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi 1 sehingga dapat menerbitkan sertifikat kompetensi sendiri;
12) SDM Asesor BPPP Ambon sebanyak 21 orang sehingga akan mampu melaksanakan uji kompetensi dengan jumlah peserta yang banyak;
13) BPPP Ambon mampu membuat sarana produksi perikanan tertentu;
14) BPPP Ambon mampu menghasilkan produk hasil perikanan yang layak dipasarkan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberikan arah bagi pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ini dituangkan dalam perencanaan strategis periode lima tahunan. Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kegiatan yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis baik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun maupun 5 (lima) tahunan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam dokumen perencanaan kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan termasuk dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan. Rencana kerja juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Rencana strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020-2024 berisi langkah-langkah strategis yang akan memberi arah bagi penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan penyuluhan dalam rangka menunjang visi Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan

masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan.

Sesuai dengan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dan untuk mencapai visi yang tertuang dalam RENSTRA, maka BPPP Ambon telah menetapkan Visi, Misi, Tugas dan Fungsi yaitu :

a. Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan menggunakan visi Presiden.

Visi BPPSDM pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi Puslatluh KP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP dan visi BPPSDM yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong- royong.

Sejalan dengan Pusat pelatihan dan Penyuluhan KP, visi BPPP Ambon pada tahun 2020-2024 adalah menggunakan Visi BPPSDM, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

b. Misi

Untuk dapat berkontribusi dalam pencapaian visi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka BPPP Ambon menerapkan misi yang sama dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menjalankan misi Presiden, KKP dan BPPSDM dalam bidang kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1) Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas SDM KP melalui Peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset Kelautan dan Perikanan;
2) Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui pelatihan dan penyuluhan KP guna mendukung peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3) Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui pelatihan dan penyuluhan KP guna mendukung Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang lestari;
4) Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

c. Tujuan

Tujuan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi KKP yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1) Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
2) Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.
3) Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
4) Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

d. Sasaran Kegiatan

Renstra BPPP Ambon tahun 2020 - 2024 menjelaskan bahwa sasaran kegiatan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program pelatihan dan penyuluhan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh BPPP Ambon sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan,

dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam dua kegiatan, yaitu Kegiatan 1. Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan serta Kegiatan 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPP Ambon.

1) Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP.

   Mewujudkan masyarakat perikanan yang sejahtera melalui pendampingan kelompok oleh penyuluh perikanan adalah tujuan yang ingin dicapai BPPP Ambon pada masa kerja 5 tahun mendatang. Keberhasilan pencapaian tujuan ini ditandai dengan indikator kinerja sebagai berikut :

   a) Tersuluhnya kelompok pelaku utama/usaha sebanyak 13.727 kelompok selama 2020-2024;
   b) Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya sebanyak 275 kelompok selama 2020- 2024;
   c) Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan sebanyak 745 kelompok selama 2020-2024.

2) Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat.

   Meningkatnya kompetensi SDM KP adalah tujuan utama pelatihan dan penyuluhan perikanan yang dilakukan oleh BPPP Ambon. Untuk mengetahui pencapaian tujuan itu, indikator yang digunakan selama 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

   a) Persentase Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di

Dunia Usaha dan Dunia Industri sebanyak 72 %.

b) Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) sebanyak 56 orang.

c) SDM KP yang dilatih sebanyak 12.015 orang.

d) Percontohan penyuluhan KP yang diterapkan sebanyak 6 unit.

e) Sarana BPPP Ambon yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 5 unit.

f) Prasarana BPPP Ambon yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 4 unit.

3) Tatakelola pemerintahan yang baik

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ingin menjadi instansi yang memiliki kinerja yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Untuk itu, tujuan ini adalah mutlak untuk menyempurnakan kekurangan yang dimiliki dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :

a) Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPP Ambon sebesar 81.

b) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon sebesar 94%.

c) Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran BPPP Ambon adalah 93,76 atau baik.

d) Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK tahun lalu dibandingkan realisasi anggaran TA. lalu sebesar $\leq$0,5 %.

e) Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon sebesar minimal 82.

e. Permasalahan

Sebagai Lembaga pelatihan dan penyuluhan yang terus berkembang menjadi pilihan utama stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, BPPP Ambon memiliki beberapa hal yang penting untuk diperbaiki antara lain :

Aspek penyelenggaraan pelatihan KP :

1) Ketersediaan tenaga pelatih (instruktur dan widyaiswara) yang terus berkurang dikarenakan beberapa sudah memasuki usia purnatugas dan mutasi;
2) Sarana dan prasarana pelatihan belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang ditetapkan dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini;
3) Kurikulum dan modul belum seluruhnya tersedia dan terstandarisasi.
4) Kurangnya program pengembangan SDM pelatih.

Sedangkan aspek penyelenggaraan penyuluhan :

1) Kelembagaan penyuluhan perikanan belum berjalan dengan optimal;
2) Kualitas dan kuantitas penyebaran penyuluh perikanan masih belum memadai;
3) Kuantitas dan kualitas materi penyuluhan perikanan masih terbatas dalam aksesibilitasnya;
4) Sarpras penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh;
5) Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas;
6) Legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia;

7) Batasan peran pemerintah daerah belum jelas, terutama terkait penyelenggaran penyuluhan pasca UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2.2 Rencana Kerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pada Rencana Strategis, BPPP Ambon didukung dengan anggaran sebesar Rp 66.790.543.000. Dukungan anggaran tersebut berupa kegiatan :

Tabel 2. Dukungan anggaran BPPP Ambon

NO.	KEGIATAN	TARGET
	PROGRAM RISET SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**66.790.543.000**
1	2375.DCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (Base Line)	90.000.000
2	2375. QDD.001 Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapat pendampingan dan penyuluhan KP	6.071.340.000
3	2375. QDD.002 Masyarakat KP yang mendapatkan percontohan perikanan	2.145.000.000
4	2375. RAL Sarana Bidang kemaritiman, kelautan dan perikanan (Base Line)	596.892.000
5	2375. RBQ Prasarana bidang kemaritiman, kelautan dan perikanan (Base Line)	150.000.000
6	2375. SCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (Base Line)	5.553.448.000
7	2378. Layanan Dukungan Manajemen	460.311.000
8	001 Gaji dan Tunjangan	45.155.340.000
9	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.568.212.000

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PANRB Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang diimplementasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah memiliki tujuan :

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelesaikan manajemen kinerja secara baik,
b. Untuk mengontrol serta mengevaluasi tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan kinerja didalam laporan kinerja ini sudah didasarkan pada analisis *logical framework*. Penetapan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2024 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Januari 2024. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024.

Sampai pada akhir Triwulan III Tahun 2024, BPPP Ambon telah mengalami perubahan Perjanjian Kinerja BPPP Ambon sebanyak 1 kali, yaitu :

1. Pada bulan April 2024, terjadi pemisahan 1 lembaga eselon II yaitu Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menjadi 2 lembaga eselon II yaitu Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan dan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sehingga membuat BPPP Ambon memiliki 2 perjanjian kinerja antara 2 lembaga eselon II tersebut.

Tabel 3. Penggabungan Perjanjian Kinerja antara Pusat Pelatihan KP dan Pusat Penyuluhan KP tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	72
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	3.302
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,682
		4	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Pelatihan Satker BPPP Ambon (Orang)	4
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	5	SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	150
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	6	Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	18
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Jumlah Peyuluh Perikanan PNS yang mengikuti Uji Kompetensi Satker BPPP Ambon (Orang)	2
		8	Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha yang disuluh Satker BPPP Ambon (Kelompok)	3.000
		9	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	90
		10	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	240
		11	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Penyuluhan Satker BPPP Ambon (Orang)	370
		12	Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	5
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di Satker BPPP Ambon (Desa)	2
		14	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	2
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	15	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1
		16	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1
7	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	17	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satker BPPP Ambon (Dokumen)	2
		18	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100
		19	Nilai Rekonsilasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	94
		20	Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		21	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	81
		22	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-R atas LK BPPP Ambon (%)	≤ 0,5
		23	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	82
		24	Penilaian Mandiri SAKIP Satker BPPP Ambon (Nilai)	78
		25	Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran BPPP Ambon (nilai)	93,76
		26	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	82

Keterangan :

	IKU dengan Pusat Pelatihan KP
	IKU dengan Pusat Penyuluhan KP

2.4 Pengukuran Kinerja

2.4.01 Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon Triwulan III Tahun 2024, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize, minimize,* dan *stabilize.* Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

a. Angka maksimum adalah 120;

b. Angka minimum adalah 0;

c. Formulasi penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda.

Adapun status indeks capaian IKU seperti gambar sebagai berikut :

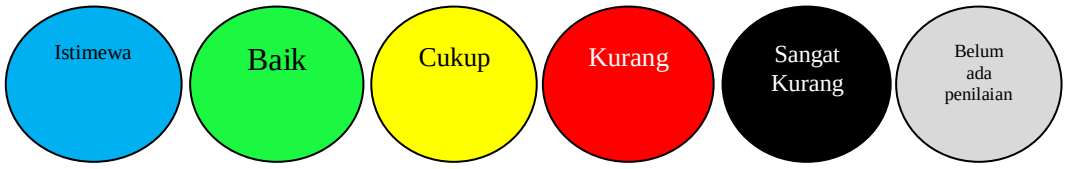

(110-120) (90 -< 110) (70 - <90) (50 - <70) (<50)

Gambar 4. Status indeks capaian IKU

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing- masing Indikator yang ada dalam dokumen *logical framework.*

2.4.02 Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup BPPP Ambon dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12), serta tahunan pada akhir tahun anggaran. Pengukuran ditugaskan kepada Tim Pengelola Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPPP Ambon Nomor 19/BPPP.AMB/OT.210/I/2023 tentang Tim Penyusunan laporan Kinerja BPPP Ambon Tahun 2022 dan Triwulanan Tahun 2024. Keanggotaan tim terdiri dari pejabat dan staf yang mewakili semua bagian lingkup BPPP Ambon. Berdasarkan laporan bagian penanggung jawab kegiatan, Kepala Balai c.q. Bagian Program, Monitoring dan Evaluasi merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Prestasi Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon triwulan III tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*Key Perfomance Indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical framework* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPP Ambon triwulan III tahun 2024 sebesar 116,00%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:

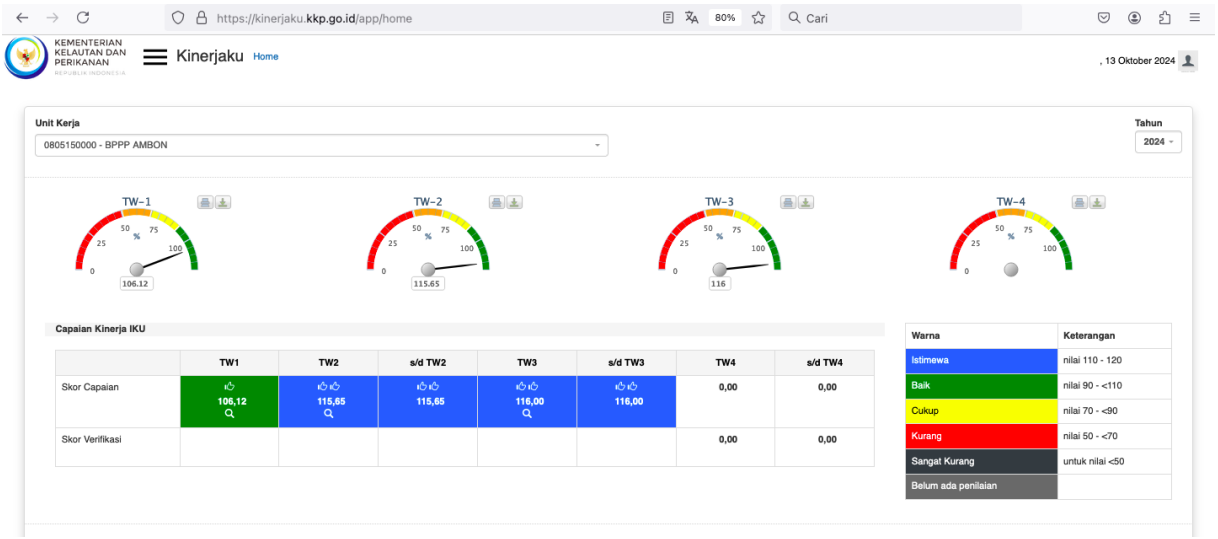

Gambar 5. Dashboard Kinerjaku Level 3 BPPP Ambon

Selama triwulan III tahun 2024, dari 8 IKU yang menjadi target triwulan III tahun 2024 BPPP Ambon, semua telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPSDM KP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran kegiatan dan tujuan kegiatan dapat tercapai. BPPP Ambon pada tahun 2024 memiliki beberapa kegiatan prioritas dengan capaian kinerja atas kegiatan prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Capaian IKU BPPP Ambon triwulan III tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW 3	REALISASI TW 3	% REALISASI
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	72	0	0	0
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	3.302	2.398	2.540	105,92
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,682	0,20	2,82	120
		4	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Pelatihan Satker BPPP Ambon (Orang)	4	0	0	0
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	5	SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	150	0	0	0
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	6	Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	18	0	0	0
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Jumlah Peyuluh Perikanan PNS yang mengikuti Uji Kompetensi Satker BPPP Ambon (Orang)	2	0	0	0
		8	Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha yang disuluh Satker BPPP Ambon (Kelompok)	3.000	2.200	2.835	120
		9	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	90	60	70	116,68
		10	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	240	100	175	120

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW 3	REALISASI TW 3	% REALISASI
		11	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Penyuluhan Satker BPPP Ambon (Orang)	370	0	0	0
		12	Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	5	0	0	0
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di Satker BPPP Ambon (Desa)	2	0	0	0
		14	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	2	0	0	0
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	15	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1	0	0	0
		16	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1	0	0	0
7	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	17	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satker BPPP Ambon (Dokumen)	2	0	0	0
		18	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100	75	75,86	101,15
		19	Nilai Rekonsilasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	94	0	0	0
		20	Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94	94	120,14	120
		21	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	81			
		22	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-R atas LK BPPP Ambon (%)	≤ 0,5	0	0	0
		23	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	82	82	100	120
		24	Penilaian Mandiri SAKIP Satker BPPP Ambon (Nilai)	78	0	0	0
		25	Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran BPPP Ambon (nilai)	93,76	0	0	0
		26	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	82	0	0	0

Keterangan : Nilai capaian maksimal 120%

Salah satu misi BPPSDM KP dalam mendukung visi Kementerian adalah peningkatan kualitas SDM KP melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset Kelautan dan Perikanan. Dengan fokus kesejahteraan masyarakat dengan didukung oleh pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan maka sasaran strategis tersebut

menjadi tujuan utama pencapaian Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dengan didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja utama atas sasaran strategis tersebut. BPPP Ambon sebagai bagian dari pembangunan kelautan dan perikanan melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsi atas pencapaian sasaran strategis tersebut dengan dukungan alokasi anggaran pada setiap IKU sasaran strategis tersebut melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan dengan sentuhan kegiatan penyuluhan KP.

Kegiatan 1. Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai sasaran kegiatan terselenggaranya pelatihan SDM kelautan dan perikanan terdapat 4 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 1: Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap Di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%), IKU 2 : Masyarakat Kelautan dan Perikanan Yang Dilatih di BPPP Ambon (Orang), IKU 3 : Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar) dan IKU 4 : Tenaga kerja yang terlibat bidang pelatihan Satker BPPP Ambon (Orang).

Indikator Kinerja 1

Persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Ambon (%)

IKU ini merupakan Persentase lulusan pelatihan merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil pelatihan (meningkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang bekerja di dunia

usaha dunia industri (DUDI) dibandingkan dengan jumlah total target pelatihan masyarakat yang diselenggarakan oleh BPPP Ambon Tahun 2024 dengan formula perhitungan lulusan pelatihan yang bekerja di DUDI dibagi total target pelatihan. Sampai akhir triwulan III Tahun 2024, BPPP Ambon masih melakukan identifikasi lulusan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri sehingga penilaiannya masih 0.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah:

a) terdapatnya instrument evaluasi pasca pelatihan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus produksi setelah dilatih, sebagai bahan capaian lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Ambon.
b) Terdapat SOP kegiatan evaluasi pasca pelatihan sebagai SOP utama BPPP Ambon.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

a) Efisiensi biaya perjalanan petugas evaluasi pasca pelatihan secara langsung dengan mengoptimalkan peran penyuluh dilapangan.
b) Kemudahan petugas evaluasi pasca pelatihan dalam merekap hasil evaluasi pasca pelatihan dikarenakan hasil yang dikirm sudah dalam bentuk softcopy sesuai dengan format yang ditetapkan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Optimalisasi peran penyuluh perikanan dalam membantu melakukan evaluasi pasca pelatihan yang tidak bisa dilakukan oleh petugas evaluasi pasca pelatihan

BPPP Ambon

2. Melakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan pelatihan menggunakan instrumen evaluasi pasca pelatihan sebagai bahan masukan untuk perbaikan penyelenggaran pelatihan berikutnya.
3. Pelaksanaan pendampingan oleh Penyuluh perikanan dalam mengidentifikasi dan melakukan pengisian instrumen evaluasi pasca pelatihan dan pendampingan penerapan hasil pelatihan.

Indikator Kinerja 2

Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (orang).

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP yang telah dilatih dengan kriteria : Pelatihan berbasis APBN, peserta merupakan masyarakat (non ASN), penyelenggaraan pelatihan regular (full tatap muka) dan pelatihan *full online*, dan peserta hanya satu kali mengikuti pelatihan di tahun yang sama, kecuali pelatihan dengan level kompetensi lebih tinggi dengan formula perhitungan Akumulasi jumlah masyarakat KP yang telah mengikuti pelatihan sesuai kriteria pelatihan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih sampai dengan triwulan III tahun 2024 perbidang kompetensi dan jenis pelatihan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

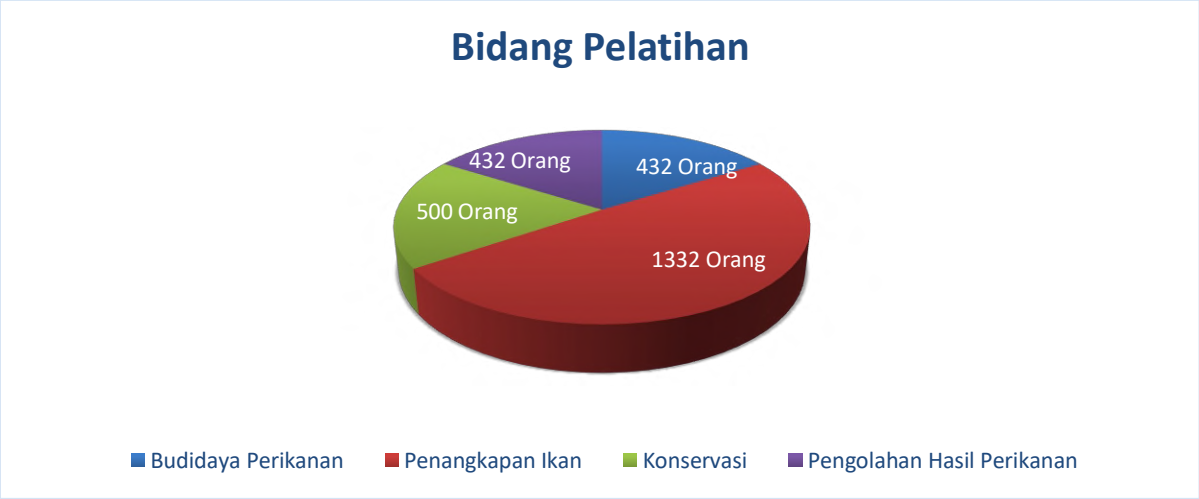

Gambar 6. Jumlah masyarakat yang dilatih berdasarkan bidang kompetensi

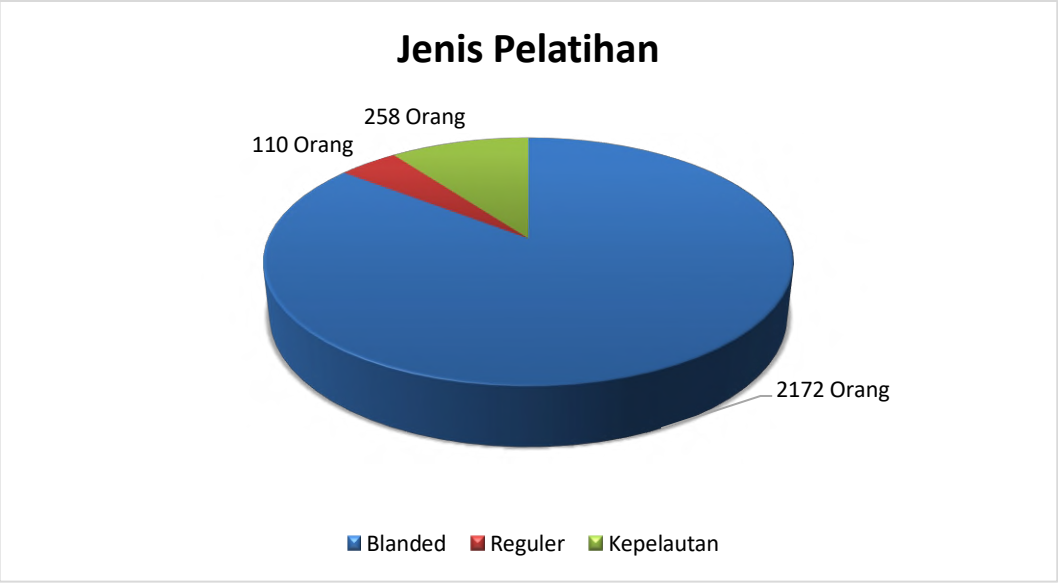

Gambar 7. Jumlah masyarakat yang dilatih berdasarkan jenis pelatihan

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih dapat dilihat pada tabel :

Tabel 5. Capaian Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Ambon

IKU 2-Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)									
Realisasi TW 3				TW 3 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
746	1063	1702	1597	2398	2540	105,92	59,05	5.000	50,80

Gambar 8. Pelatihan Basic Safety Training

Gambar 9. Pelatihan SKN di Kab. Merauke

Gambar 10. Pelatihan Ecobrick Kolam Ikan Hias di Kab. Merauke

Gambar 11. Pelatihan Olahan Produk Perikanan di Kab. Merauke

Gambar 12. Pelatihan SKN di Kab. Seram Bagian Barat

Capaian indikator ini telah mencapai 2.540 orang dari target yaitu 2.398 orang. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu triwulan III tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 59,05%. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian triwulan III tahun 2024 sebesar 50,80%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Perbandingan realisasi Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	13.950	18.864	120
2	BPPP Banyuwangi	6.656	7.475	112,30
3	BPPP Bitung	2.738	2.906	106,13
4	BPPP Ambon	2.398	2.540	105,92
5	BPPP Medan	3.092	3.363	108,76

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah:

a) Adanya SOP kegiatan pelatihan yang merupakan SOP utama BPPP Ambon
b) Kalender pelatihan blanded telah disampaikan kepada Anggota Komisi IV DPR RI sebagai komitmen kegiatan penyelenggaraan pelatihan yang harus dilaksanakan
c) Adanya aplikasi SiPintar BPPP Ambon mempermudah dan mempersingkat waktu Identifikasi kebutuhan pelatihan dan pendaftaran pelatihan secara online

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Efisiensi biaya koordinasi persiapan pelatihan menggunakan media Whatshapp
2. Persiapan kegiatan pelatihan yang dilakukan secara intensif oleh panitia pelatihan dan penyuluh pendamping sehingga proses kegiatan pelatihan dapat berjalan dengan lancar sampai akhir kegiatan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Membuat kalender pelatihan KP sesuai arahan kebijakan pimpinan, kebutuhan daerah dan potensi daerah
2. Bekerjasama dengan Penyuluh pendamping rencana kegiatan pelatihan yang akan diselenggarakan baik secara *zoom meeting* maupun komunikasi secara intensif melalui telepon.

Indikator Kinerja 3

Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar).

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan.

Cara perhitungan IKU tersebut dengan menjumlahkan seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan yang tercatat pada aplikasi OM SPAM BPPP Ambon.

Sampai akhir triwulan III Tahun 2024 BPPP Ambon telah memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan berdasarkan surat dari Sekertaris BPPSDM KP Nomor B.7471/BPPSDM.1/KU.340/X/2024 tentang capaian PNBP Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2,82 Miliar.

Tabel 7. Capaian Nilai PNBP Satker BPPP Ambon

IKU 3-Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)									
Realisasi TW 3				TW 3 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0	0	0,39	0,42	0,2	2,82	120 (1.410)	571,43	0,405	696,3

Capaian indikator ini telah mencapai 2,82 rupiah miliar dari target yaitu 0,2 rupiah miliar. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu triwulan III tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 571,43%. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian triwulan III tahun 2024 sebesar 696,30%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Perbandingan realisasi Nilai PNBP Satker dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	7,35	12,09	120
2	BPPP Banyuwangi	0,70	1,35	120
3	BPPP Bitung	0,13	0,38	120
4	BPPP Ambon	0,20	2,82	120
5	BPPP Medan	0,38	0,43	113,16

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah

a) Adanya aplikasi SiPintar BPPP Ambon mempermudah dan mempersingkat waktu pendaftaran pelatihan BST bersumber dari PNBP secara online
b) Komitmen Pimpinan dan Tim Humas dalam melakukan Promosi baik secara langsung maupun pada media sosial BPPP Ambon kegiatan strategis sebagai sumber penghasil PNBP serta membangun jejaring kerjasama dengan stakeholder dalam segi peningkatan kapasitas SDM KP.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penggunaan aplikasi SiPintar BPPP Ambon dalam melakukan pendaftaran pelatihan BST bersumber dari PNBP memudahkan peserta dalam menginput berkas tanpa harus datang langsung ke BPPP Ambon

2. Pemanfaatan aset barang milik negara yang dilaksanakan secara optimal
3. Promosi dengan menggunakan media sosial lebih meningkatkan ruang lingkup promosi bahkan sampai luar Provinsi Maluku, sehingga dapat mengefisiensi anggaran promosi dan petugas yang melakukan promosi tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Kegiatan pelatihan *Basic Safety Trainng* (BST) yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan kerjasama pelatihan yang menggunakan sarana dan prasarana BPPP Ambon yang sangat memadai.

Indikator Kinerja 4

Tenaga kerja yang terlibat Bidang Pelatihan Satker BPPP Ambon (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan. Tenaga kerja yang terlibat langsung di lingkup BPPSDM diantaranya : P2MKP, Tenaga Kerja Harian Lepas yang terlibat dalam kegiatan SFV dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

Sampai akhir triwulan III Tahun 2024, BPPP Ambon masih melakukan identifikasi tenaga kerja yang terlibat bidang pelatihan satker BPPP Ambon sehingga penilaiannya masih 0.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah tersedianya instrumen tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Ambon baik yang dilakukan oleh pengelola Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Efisiensi biaya perjalanan petugas identifikasi tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Ambon secara langsung sehingga dapat dialihkan untuk kegiatan strategis yang lain yang mendukung peningkatan kinerja BPPP Ambon.
2. Kemudahan petugas identifikasi tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Ambon dalam merekap hasil evaluasi pasca pelatihan dikarenakan hasil yang dikirm sudah dalam bentuk softcopy sesuai dengan format kuisioner yang ditetapkan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan III Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki kegiatan strategis berupa Sosialisasi peranan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam mengidentifikasi tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Ambon.

Sasaran Kegiatan 2

Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai sasaran kegiatan terselenggaranya sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan terdapat 1 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 5 : SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang).

Indikator Kinerja 5

SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah SDM KP yang mengikuti uji kompetensi sesuai dengan persyaratan uji kompetensi. Peserta yang mendapatkan sertifikat kompetensi adalah yang sudah dinyatakan lulus sesuai dengan persyaratan dan ujian. Sertifikat dikeluarkan oleh LSP/BNSP dan atau Lembaga Sertifikasi lainnya.

IKU ini merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2023, cara perhitungannya dengan menghitung jumlah SDM yang mengikuti sertifikasi kompetensi di wilayah kerja BPPP Ambon.

Sampai akhir triwulan III Tahun 2024, BPPP Ambon masih melakukan identifikasi lulusan pelatihan yang akan dilakukan sertifikasi kompetensi sehingga penilaiannya masih 0.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah

1. Resertifikasi LSP BPPP Ambon telah terbit pada tahun 2023 sehingga dapat melakukan uji kompetensi kembali kepada lulusan peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPP Ambon.
2. Jumlah asesor kompetensi BPPP Ambon yang masih memenuhi standar kegiatan

sertifikasi kompetensi baik bidang budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, permesinan kapal, penangkapan ikan dan konservasi perikanan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Kelengkapan sarana dan prasarana sertifikasi kompetensi yang tersedia di BPPP Ambon.
2. Promosi dengan menggunakan media sosial lebih meningkatkan ruang lingkup promosi bahkan sampai luar Provinsi Maluku, sehingga dapat mengefisiensi anggaran promosi dan petugas yang melakukan promosi tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. kegiatan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan kerjasama sertifikasi kompetensi dengan sekolah-sekolah yang memutuhkan sertifikasi kompetensi bagi anak didiknya.

Sasaran Kegiatan 3

Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP

Untuk mencapai sasaran kegiatan terselenggaranya kaji terap pelatihan KP terdapat indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 6 : Lulusan Pelatihan Yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan) di BPPP Ambon (Orang)

Indikator Kinerja 6

Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (Usaha Rintisan) di BPPP Ambon (orang).

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dengan memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya (pengembangan ekonomi digital) dan atau membuat jejaring pasar dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2020, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah pelaku utama lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dan memanfaatkan teknologi digital dan atau jejaring pasar dalam pengembangan usahanya yang dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus periode setelah dilatih.

Sampai akhir triwulan III Tahun 2024, BPPP Ambon masih melakukan identifikasi lulusan pelatihan yang akan membentuk start up sehingga penilaiannya masih 0.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah adanya instrumen evaluasi pasca pelatihan oleh purnawidya yang nantinya akan menjadi output yang membentuk *start up* (usaha rintisan) yang mudah dipahami oleh purnawidya pelatihan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Efisiensi biaya perjalanan petugas evaluasi pasca pelatihan secara langsung sehingga dapat dialihkan untuk kegiatan strategis yang lain yang mendukung peningkatan kinerja BPPP Ambon.
2. Kemudahan petugas evaluasi pasca pelatihan dalam merekap hasil evaluasi

pasca pelatihan dikarenakan hasil yang dikirm sudah dalam bentuk softcopy sesuai dengan format yang ditetapkan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Telah menyiapkan instrumen Evaluasi pasca pelatihan untuk identifikasi purnawidya yang membentuk *start up* (usaha rintisan)
2. Bekerjasama dengan Penyuluh pendamping kegiatan pelatihan yang telah diselenggarakan dalam identifikasi dan pengisian instrumen Evaluasi pasca pelatihan.

Sasaran Kegiatan 4

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai sasaran kegiatan terselenggaranya penyuluhan kelautan dan perikanan terdapat 5 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 7 : Jumlah penyuluh perikanan PNS yang mengikuti uji kompetensi Satker BPPP Ambon (Orang), IKU 8 : Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha Yang Disuluh Di Satker BPPP Ambon, IKU 9 : Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satker BPPP Ambon (Kelompok), IKU 10 : Kelompok kelautan dan perikanan Yang Dibentuk di Satker BPPP Ambon dan IKU 11 : Tenaga kerja yang terlibat bidang penyuluhan Satker BPPP Ambon (orang)

Indikator Kinerja 7

Jumlah Penyuluh Perikanan PNS yang mengikuti Uji Kompetensi Satker BPPP Ambon (Orang)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Penyuluh KP yang mengikuti uji kompetensi sesuai dengan persyaratan uji kompetensi. Peserta yang mendapatkan sertifikat kompetensi adalah yang sudah dinyatakan lulus sesuai dengan persyaratan dan ujian. Sertifikat dikeluarkan oleh Biro SDMAO KKP.

IKU ini baru ada pada tahun 2024, cara perhitungannya dengan menghitung presentase Penyuluh yang lulus sertifikasi kompetensi di wilayah kerja lingkup Pusat Penyuluhan KP. Sampai akhir triwulan III Tahun 2024, BPPP Ambon masih melakukan identifikasi penyuluh yang akan melakukan uji kompetensi sehingga penilaiannya masih 0.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah penyuluh aktif memahami peraturan terkait tugas pokok dan fungsi penyuluhan perikanan dan memiliki data dukung penyuluhan yang lengkap sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Uji kompetensi dapat dilaksanakan dengan metode Asesmen Jarak Jauh sehingga dapat mengefisiensi biaya perjalanan penyuluh ke tempat uji kompetensi
2. Bukti Portofolio yang dibutuhkan dapat berupa soft copy yang dimasukkan kedalam link Goggle Drive sehingga mengefisiensi biaya hard copy.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki kegiatan strategis berupa aktif melakukan

sosialisasi terkait materi yang akan diujikan kepada penyuluh yang akan dilakukan uji kompetensi sehingga diharapkan penyuluh yang dilakukan uji kompetensi dapat dinyatakan kompeten dalam bidangnya.

Indikator Kinerja 8

Kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang disuluh di Satker BPPP Ambon (Kelompok).

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan.

IKU ini sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP Ambon pada tahun 2017, akan tetapi pola perhitungannya adalah perhitungan secara individu atau perorangan dengan realisasi pada tahun 2018 sebanyak 25.358 orang, pada tahun 2019 sebanyak 34.500 orang, pada tahun 2020 sebanyak 2.686 kelompok dan pada tahun 2021 sebanyak 2.641 kelompok, sampai akhir triwulan III tahun 2024 Penyuluh Satminkal BPPP Ambon sudah melakukan penyuluhan sebanyak 2.835 kelompok dari target triwulan III Tahun 2024 kelompok yang disuluh sebanyak 2.200 kelompok sehingga nilai pencapaiannya sudah 120 %.

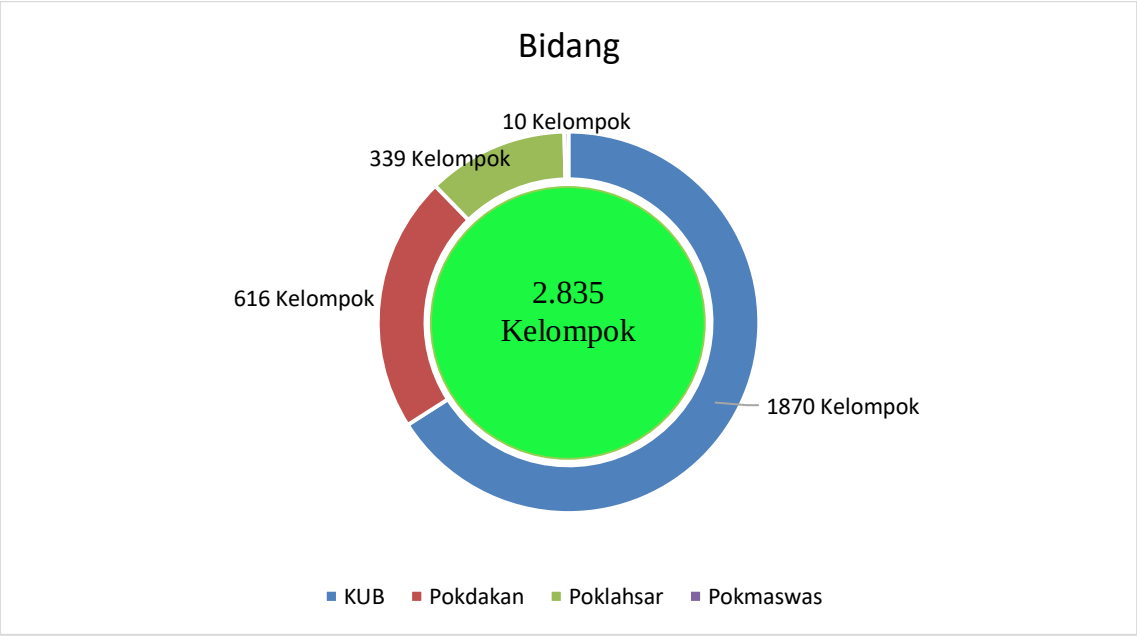

Gambar 13. Jumlah Kelompok yang disuluh per bidang

Tabel 9. Capaian Jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon

IKU-8. Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)									
Realisasi TW 3				TW 3 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
2583	2396	2400	2038	2200	2835	120 (128,86)	39,11	5.000	56,70

Capaian indikator ini telah mencapai 2835 kelompok dari target yaitu 2200 kelompok. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu triwulan III tahun 2024, terjadi peningkatan sebesar 39,11%. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian triwulan III tahun 2024 sebesar 56,70%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka

perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10. Perbandingan realisasi jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	4.750	4.750	100
2	BPPP Banyuwangi	4.100	4.700	114,63
3	BPPP Bitung	2.350	2.350	100
4	BPPP Ambon	2.200	2.835	120
5	BPPP Medan	4.750	5.557	116,99

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya Peraturan Kepala BRSDM KP nomor 63 tahun 2022 tentang pedoman kerja penyuluh perikanan, asisten penyuluh perikanan penyuluh perikanan PPTK dan penyuluh perikanan bantu.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh berdasarkan perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang tercascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki kegiatan strategis, yaitu masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang

disuluh sesuai dengan wilayah binaannya berdasarkan perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan.

Gambar 14. Penyuluhan Pada Kelompok pengolahan hasil perikanan di Kota Ternate

Gambar 15. Penyuluhan Pada Kelompok pengolahan hasil perikanan di Kota Ambon

Indikator Kinerja 9

Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di satker BPPP Ambon (Kelompok).

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas kelompoknya sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan.

IKU ini sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP Ambon pada tahun 2017, akan tetapi pola perhitungannya adalah perhitungan secara individu atau perorangan dengan realisasi pada tahun 2018 sebanyak 25.358 orang,

tahun 2019 sebanyak 34.500 orang, tahun 2020 sebanyak 240 Kelompok, tahun 2021 sebanyak 38 kelompok dan tahun 2022 sebanyak 73 kelompok.

Sampai akhir triwulan III tahun 2024, Penyuluh Satminkal BPPP Ambon telah melakukan peningkatan kelas kelompok pelaku utama/pelaku usaha di Satminkal BPPP Ambon sebanyak 70 kelompok dari target sebanyak 60 kelompok sehingga nilai pencapaiannya sudah 116,68%.

Gambar 16. Jumlah Kelompok yang ditingkatkan

Tabel 11. Capaian Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di satker BPPP Ambon

IKU-9. Kelompok Kelautan dan Perikanan ditingkatkan kelasnya di Satker BPPP Ambon (Kelompok)									
Realisasi TW 3				TW 3 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0	20	37	42	60	70	116,68	66,67	100	70

Capaian indikator ini telah mencapai 70 kelompok dari target yaitu 60 kelompok. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu triwulan III tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 116,67%. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian triwulan III tahun 2024 sebesar 70%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Perbandingan realisasi Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di satker BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	150	150	100
2	BPPP Banyuwangi	150	170	113,33
3	BPPP Bitung	100	102	102
4	BPPP Ambon	60	70	116,68
5	BPPP Medan	50	60	120

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya Peraturan Kepala BRSDM KP nomor 63 tahun 2022 tentang pedoman kerja penyuluh perikanan, asisten penyuluh perikanan penyuluh perikanan PPTK dan penyuluh perikanan bantu.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu

penyuluh yang tercascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Penyuluh melakukan pendampingan kelompok dan telah mengidentifikasi dan melakukan peningkatan kelas kelompok terhadap calon kelompok dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan melalui pendampingan yang dilakukan.
3. Surat Keputusan dan verifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pejabat Pemerintah Daerah telah ditetapkan.

Gambar 23. Peningkatan Kelas Kelompok di Kota Ternate

Indikator Kinerja 10

Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk di Satker BPPP Ambon (Kelompok).

Merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dibentuk dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum

Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan.

IKU ini sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP Ambon pada tahun 2017, namun merupakan target antara Seksi Penyuluhan dengan penyuluh Satminkal dengan target sebanyak 70 % penyuluh yang melakukan penilaian kelas kelompok. Pada tahun 2019 nilai pencapaian IKU ini sudah mencapai 1.462 unit, tahun 2020 nilai pencapaiannya sebanyak 136 kelompok, tahun 2021 nilai pencapaiannya sebanyak 130 kelompok dan tahun 2022 nilai pencapaiannya sebanyak 232 kelompok, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung Jumlah kelompok Pelaku utama yang dibentuk yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penumbuhan kelompok yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Sampai akhir triwulan III tahun 2024, Penyuluh Satminkal BPPP ambon telah melakukan pendataan calon kelompok yang ditumbuhkan kelompoknya sebanyak 175 kelompok dari target triwulan III tahun 2024 sebanyak 100 kelompok sehingga persentase didapat sebesar 120%.

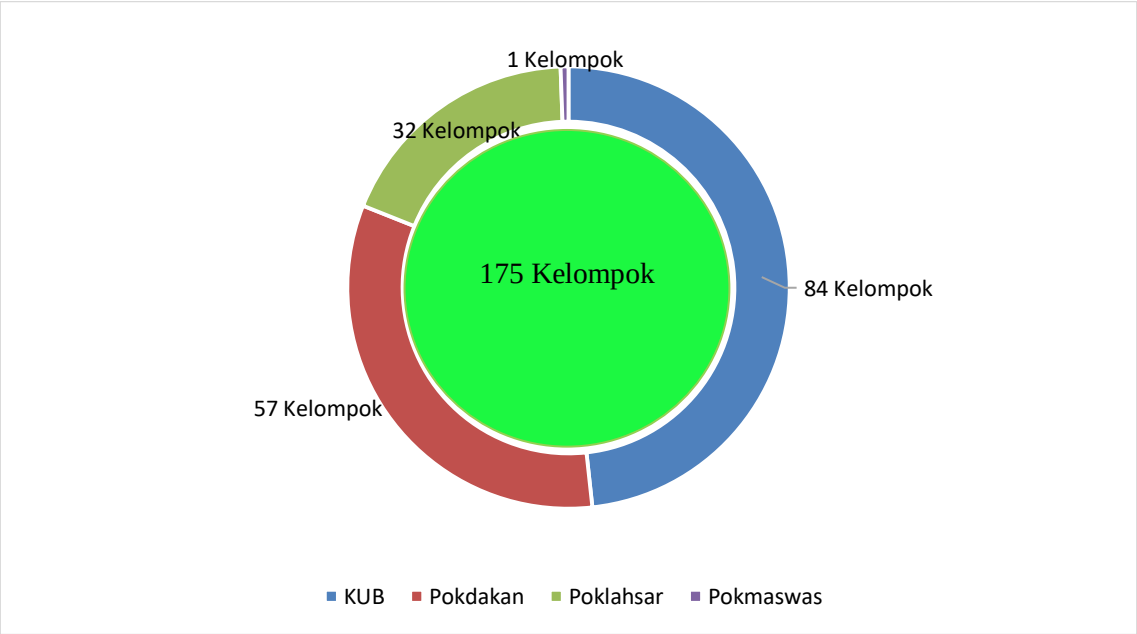

Gambar 17. Jumlah Kelompok yang dibentuk

Tabel 13. Capaian Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon

IKU-10. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)									
Realisasi TW 3				TW 3 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
98	122	220	200	100	175	120 (175)	-12,5	500	35

Capaian indikator ini telah mencapai 175 kelompok dari target yaitu 100 kelompok. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu triwulan III tahun 2023, terjadi penurunan sebesar 12,5%. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian triwulan III tahun 2024 sebesar 35%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14. Perbandingan realisasi Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	95	110	115,79
2	BPPP Banyuwangi	350	400	114,29
3	BPPP Bitung	200	224	112
4	BPPP Ambon	100	175	120
5	BPPP Medan	450	511	113,56

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya Peraturan Kepala BRSDM KP nomor 63 tahun 2022 tentang pedoman kerja penyuluh perikanan, asisten penyuluh perikanan PPTK dan penyuluh perikanan bantu.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu

penyuluh yang tercascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Antusias masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan pada tahun 2024.

Gambar 18. Penumbuhan kelompok di Kota Jayapura

Gambar 19. Penumbuhan kelompok di Kota Ambon

Indikator Kinerja 11

Tenaga kerja yang terlibat Bidang Penyuluhan Satker BPPP Ambon (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan. Tenaga kerja yang terlibat langsung di lingkup BPPSDM diantaranya : Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) dan UMKM yang disuluh dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

Sampai akhir triwulan III Tahun 2024, BPPP Ambon masih melakukan identifikasi tenaga kerja yang terlibat satker BPPP Ambon sehingga penilaiannya masih 0.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah tersedianya instrumen tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Ambon baik yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan maupun pengelola Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Efisiensi biaya perjalanan petugas identifikasi tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Ambon secara langsung sehingga dapat dialihkan untuk kegiatan strategis yang lain yang mendukung peningkatan kinerja BPPP Ambon.
2. Kemudahan petugas identifikasi tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Ambon dalam merekap hasil evaluasi pasca pelatihan dikarenakan hasil yang dikirm

sudah dalam bentuk softcopy sesuai dengan format kuisioner yang ditetapkan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan III Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki kegiatan strategis berupa Sosialisasi peranan penyuluh perikanan baik PNS, PPB dan Swadaya dalam mengidentifikasi tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Ambon

Indikator Kinerja 12

Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di Satker BPPP Ambon (Kelompok)

Merupakan indikator yang menunjukkan Usaha Mikro, Kecil, yang merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemertaan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Tujuan dari Izin berusaha adalah : mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan; mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke Lembaga keuangan bank dan non bank; mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau Lembaga lainnya.

IKU ini baru ada pada tahun 2024, cara perhitungannya dengan menghitung Jumlah pelaku utama/pelaku usaha KP yang memenuhi kriteria yang telah dilakukan pendampingan oleh penyuluh yang akan mendapatkan perizinan dalam berusaha.

Sampai akhir triwulan III Tahun 2024, BPPP Ambon masih melakukan identifikasi penyuluh yang akan melakukan uji kompetensi sehingga penilaiannya masih 0.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah penyuluh aktif memahami peraturan terkait tugas pokok dan fungsi penyuluhan perikanan dan memiliki data dukung penyuluhan yang lengkap sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu lokasi percontohan penyuluhan KP yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan target kinerja individu penyuluh yang tercascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Telah menyiapkan instrumen persyaratan Perizinan Berusaha.
2. Bekerjasama dengan Lembaga keuangan bank dan non bank dalam Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan.

Sasaran Kegiatan 5

Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP terdapat 2 (dua) Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 13 : Desa/kawasan Mitra Yang Menerapkan Iptek di BPPP Ambon (Desa Perikanan Cerdas) dan IKU 14 : Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satker BPPP Ambon (Kelompok).

Indikator Kinerja 13

Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di Satker BPPP Ambon (Desa).

Desa/Kawasan mitra merupakan konsep pembangunan desa perikanan yang berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa yang diwujudkan dalam kegiaan prioritas BPPSDM yaitu Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries village (SFV)

Sesuai dengan Keputusan Ka BRSDM No.38/2022, dengan dikembangkannya Desa Perikanan cerdas/*Smart Fisheries Village* (SFV) akan terbentuk desa perikanan unggulan yang produktif yang mampu menerapkan teknlogi dan informasi, mandiri dan memperhatikan prinsip berkelanjutan

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2020, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah Desa yang memanfaatkan teknologi dan inovasi kelautan dan perikanan tahun 2022 yang dibuktikan dengan MOU/PKS antara Kepala Badan RSDMKP dengan Bupati/Walikota.

Sampai akhir triwulan III Tahun 2024, BPPP Ambon masih melakukan identifikasi lokasi desa/kawasan mitra yang menerapkan IPTEK di BPPP Ambon sehingga penilaiannya masih 0.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Adanya keputusan kepala BRSDM KP No. 156 Tahun 2023 tentang penetapan lokasi Desa Perikanan Cerdas/Smart Fisheries Village
2. Nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Ambon dengan BRSDM KP no. 3/BRSDM/KKP/KB/II/2023-523/03/NK/2023 tentang sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan SDM KP di Desa Perikanan Cerdas/Smart Fisheries Village

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Lokasi desa perikanan cerdas berada disamping BPPP Ambon sehingga memudahkan pemantauan progress kemajuan
2. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
3. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang tercascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan III Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Antusias masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan pada tahun 2024.

Indikator Kinerja 14

Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satker BPPP Ambon (Kelompok)

Merupakan indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan perikanan tepat guna. Pemilihan lokasi percontohan melalui tahap koordinasi dengan pemerintah setempat dan proposal perontohan telah disetujui oleh Pusat pelatihan dan Penyuluhan sebagaimana yang tercantum dalam pedoman pelaksanaa percontohan dan Pedoman SFV.

IKU ini sudah ada pada tahun 2019 dengan pencapaian sebanyak 2 kelompok, pada tahun 2020 sebanyak 1 kelompok, pada tahun 2021 sebanyak 1 Paket dan pada tahun 2022 sebanyak 1 paket.

Sampai akhir triwulan III Tahun 2024, BPPP Ambon masih melakukan identifikasi kelompok masyarakat yang mendapatkan percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan di BPPP Ambon sehingga penilaiannya masih 0.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah komitmen kinerja penyuluhan dan arahan yang dilakukan baik secara daring maupun

luring oleh Kepala BPPP Ambon dalam rangka merealisasikan indikator kinerja individu yang tercascading langsung kepada indikator kinerja BPPP Ambon.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu lokasi percontohan penyuluhan KP yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan target kinerja individu penyuluh yang tercascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki kegiatan strategis, diantaranya pelaksanaan kegiatan percontohan KP berdasarkan juknis yang telah ditetapkan oleh Puslatluh KP.

Sasaran Kegiatan 6

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP terdapat 2 (dua) Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 15 : Jumlah Sarana Pelatihan KP Yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit) dan IKU 16 : Jumlah Prasarana Pelatihan KP Yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit).

Indikator Kinerja 15

Sarana pelatihan KP Yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Ambon (unit).

Merupakan indikator Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPP Ambon dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2021, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung Jumlah Sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah tersedianya SOP pengadaan dan seluruh Proses pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan di LPSE.

Sampai akhir triwulan III Tahun 2024, BPPP Ambon masih melakukan pengadaan sarana pelatihan dan penyuluhan KP sehingga penilaiannya masih 0.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Kegiatan pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan dengan baik dengan menunjuk pihak penyedia yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan dengan harga penawaran lebih rendah dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Pejabat pengadaan barang dan jasa telah memiliki sertifikat kompetensi sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Kegiatan pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan menunjuk pihak penyedia yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan
2. BPPP Ambon membuat komitmen terkait penyelesaian Kegiatan pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Indikator Kinerja 16

Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP Yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Ambon (unit).

Merupakan indikator Peningkatan kapasitas prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPP Ambon dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2021, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung Jumlah Prasarana yang berbentuk pembangunan dan renovasi bangunan/belanja modal.

Sampai akhir triwulan III Tahun 2024, BPPP Ambon masih melakukan proses renovasi bangunan prasarana pelatihan dan penyuluhan KP sehingga penilaiannya masih 0.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah tersedianya SOP pengadaan dan seluruh Proses pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan di LPSE.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Kegiatan pengadaan/pekerjaan prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan dengan baik dengan menunjuk pihak penyedia yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan dengan harga penawaran lebih rendah dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Pejabat pengadaan barang dan jasa telah memiliki sertifikat kompetensi sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Kegiatan pengadaan/pekerjaan prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan menunjuk pihak penyedia yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan
2. BPPP Ambon membuat komitmen terkait penyelesaian Kegiatan pengadaan/pekerjaan prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kegiatan 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPP Ambon

Sasaran Kegiatan 7

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon

Untuk mencapai Sasaran kegiatan Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon terdapat 10 Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 17 : Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan

Kelautan dan Perikanan di Satker BPPP Ambon, IKU 18 : Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon, IKU 19 : Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon, IKU 20 : Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Ambon, IKU 21 : Indeks profesionalitas ASN BPPP Ambon, IKU 22 : Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-R Atas LK BPPP Ambon, IKU 23 : Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BPPP Ambon, IKU 24 : Penilaian Mandiri SAKIP di BPPP Ambon, IKU 25 : Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPPP Ambon dan IKU 26 : Nilai kinerja anggaran BPPP Ambon.

Indikator Kinerja 17

Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satker BPPP Ambon (Dokumen)

Merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama Penyuluhan kelautan dan perikanan dengan Dasar Hukum PerMenKP 65/2016 tentang pedoman KS dan penyusunan perjanjian di lingkungan KKP. Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/ organisasi lainnya yang memiliki kesamaan profesi/kepakaran yang diikuti oleh Satker/ UPT, Kemitraan adalah hubungan dengan badan/ perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama.

IKU ini baru ada pada tahun 2024, cara perhitungannya dengan cara :

1. Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja lingkup BPPSDM yang di dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Sekretariat BPPSDM pada tahun yang masih berjalan sampai dengan tahun 2024.

2. Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja lingkup BPPSDM yang di dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Sekretariat BPPSDM yang terbentuk diluar PEMDA sesuai PP Nomor 28/2018 tentang Kerjasama Daerah

Sampai akhir triwulan III Tahun 2024, BPPP Ambon masih melakukan identifikasi kemitraan yang akan melakukan kesepakatan sehingga penilaiannya masih 0.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah penyuluh aktif memahami peraturan terkait tugas pokok dan fungsi penyuluhan perikanan dan memiliki data dukung penyuluhan yang lengkap sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu lokasi percontohan penyuluhan KP yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan target kinerja individu penyuluh yang tercascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan
2. Diseminasi dan publikasi;

3. Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama
4. Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh BPPSDM

Indikator Kinerja 18

Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%).

Merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan layanan dukungan manajemen internal berupa tersedianya laporan-laporan kegiatan BPPP Ambon.

Perhitungan Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon ini dihitung berdasarkan pemenuhan laporan-laporan kegiatan BPPP Ambon berupa laporan tahunan, laporan pelaksanaan program dan kegiatan dan laporan keuangan.

Perhitungan ini dilakukan setiap triwulan tahun 2024, sesuai dengan data dukung yang telah dikerjakan, sampai akhir triwulan III Tahun 2024, BPPP Ambon sudah memenuhi dokumen pendukung sebanyak 75,86% dari target triwulan III tahun 2024 sebesar 75%.

Tabel 15. Pemenuhan dokumen Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon

No.	Nama Dokumen	Periode Pelaporan	Target Jumlah Dokumen (Tahunan)	Jumlah Dokumen (Triwulan III)
1	Dokumen Perencanaan Anggaran			
	1) Dokumen KAK	Tahunan	1	1
	2) Dokumen RAB	Tahunan	1	1
	3) Dokumen RKAKL	Tahunan	1	1
2	Dokumen Perencanaan Kinerja			
	1) Perjanjian Kinerja	Tahunan	1	1
	2) Rencana Aksi	Tahunan	1	1
	3) Rincian Target IKU	Tahunan	1	1
	4) Manual IKU	Tahunan	1	1
3	Dokumen Reviu Renstra	Tahunan	1	1
4	Dokumen Laporan Kinerja			
	1) LKj Triwulan IV Tahun 2023	Triwulan	1	1
	2) LKj Triwulan I Tahun 2024	Triwulan	1	1
	3) LKj Triwulan II Tahun 2024	Triwulan	1	1

	4) LKj Triwulan III Tahun 2024	Triwulan	1	
5	Dokumen Laporan SPIP	Mingguan		
	1) Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2023	Triwulan	1	1
	2) Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2024	Triwulan	1	1
	3) Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2024	Triwulan	1	1
	4) Laporan SPIP Triwulan III Tahun 2024	Triwulan	1	
6	Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara	Bulanan		
	1) LPj Bendahara Bulan Desember 2023	Bulanan	1	1
	2) LPj Bendahara Bulan Januari	Bulanan	1	1
	3) LPj Bendahara Bulan Februari	Bulanan	1	1
	4) LPj Bendahara Bulan Maret	Bulanan	1	1
	5) LPj Bendahara Bulan April	Bulanan	1	1
	6) LPj Bendahara Bulan Mei	Bulanan	1	1
	7) LPj Bendahara Bulan Juni	Bulanan	1	1
	8) LPj Bendahara Bulan Juli	Bulanan	1	1
	9) LPj Bendahara Bulan Agustus	Bulanan	1	1
	10) LPj Bendahara Bulan September	Bulanan	1	
	11) LPj Bendahara Bulan Oktober	Bulanan	1	
	12) LPj Bendahara Bulan November	Bulanan	1	
7	Dokumen Laporan PNBP	Bulanan		
	1) Bulan Desember 2023	Bulanan	1	1
	2) Bulan Januari	Bulanan	1	1
	3) Bulan Februari	Bulanan	1	1
	4) Bulan Maret	Bulanan	1	1
	5) Bulan April	Bulanan	1	1
	6) Bulan Mei	Bulanan	1	1
	7) Bulan Juni	Bulanan	1	1
	8) Bulan Juli	Bulanan	1	1
	9) Bulan Agustus	Bulanan	1	1
	10) Bulan September	Bulanan	1	
	11) Bulan Oktober	Bulanan	1	
	12) Bulan November	Bulanan	1	
8	Dokumen Weekly Report	Mingguan		
	1) Bulan Januari	Mingguan	1	1
	2) Bulan Februari	Mingguan	1	1
	3) Bulan Maret	Mingguan	1	1
	4) Bulan April	Mingguan	1	1
	5) Bulan Mei	Mingguan	1	1
	6) Bulan Juni	Mingguan	1	1
	7) Bulan Juli	Mingguan	1	1
	8) Bulan Agustus	Mingguan	1	1
	9) Bulan September	Mingguan	1	1
	10) Bulan Oktober	Mingguan	1	
	11) Bulan November	Mingguan	1	
	12) Bulan Desember	Mingguan	1	
9	Dokumen Laporan Program dan Kegiatan	Tahunan	1	
10	Laporan Keuangan	Semester		
	1) Semester I Tahun 2024	Semester	1	1
11	Laporan BMN	Semester	_	
	1) Semester I Tahun 2024	Semester	1	1
12	Laporan PM SAKIP	Tahunan	1	1
13	Laporan Barang KPA	Tahunan	1	
14	Laporan PIPK Tahun 2024	Tahunan	1	
		Jumlah	**58**	**44**
		%	**100**	**75,86**

Tabel 16. Capaian Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon

IKU 18- Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)									
Realisasi TW 3				TW 3 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0	0	0	75	75	75,86	101,15	1,15	100	75,86

Capaian indikator ini telah mencapai 78,86% dari target yaitu 75%. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu triwulan III tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 101,15%. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian triwulan III tahun 2024 sebesar 75,86%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17. Perbandingan realisasi Persentase layanan dukungan manajemen internal dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	75	77,36	103,15
2	BPPP Banyuwangi	75	77,27	103,03
3	BPPP Bitung	75	75	100
4	BPPP Ambon	75	75,86	101,15
5	BPPP Medan	75	75	100

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah tersedianya SOP terkait pembuatan seluruh laporan yang merupakan bagian dari layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini dengan mengetahui Progres capaian IKU triwulanan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, mengingat seluruh penyusunan laporan yang merupakan bagian dari layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon tersebut telah didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai sehingga efektifitas dan efisiensi dalam pemenuhan dokumen tersebut dapat dilakukan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh dokumen yang telah ditargetkan dapat terpenuhi dengan baik.

Indikator Kinerja 19

Nilai Rekonsilasi Kinerja BPPP Ambon (nilai).

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKJ), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam PK dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

Penghitungan Nilai Rekonsilasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu:

a. Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III

b. Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data

c. Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2022 pada aplikasi kinerjaku

Sampai akhir triwulan III Tahun 2024, BPPP Ambon masih melakukan persiapan penilaian rekonsiliasi kinerja yang dilakukan oleh Sekertaris BPPSDM KP sehingga penilaiannya masih 0.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah tersedianya SOP terkait pembuatan seluruh dokumen dan laporan untuk dapat meningkatkan aspek-aspek kinerja pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan tersebut, progres capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, mengingat seluruh pemenuhan dokumen dan laporan harus memiliki konsistensi kepatuhan dalam penyusunan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. SDM yang menangani pemenuhan rekonsilisasi kinerja pun telah memiliki pemahaman yang baik terkait pemenuhan IKU tersebut dengan mengikuti kegiatan pra rekonsiliasi kinerja yang diselenggarakan oleh Sekertaris BPPSDM KP.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh IKU yang merupakan IKU tahunan telah memiliki progress yang nantinya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2024.

Indikator Kinerja 20

Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan, pengetahuan dan pengalaman dalam organisasi tersebar, tidak terdokumentasi dan bahkan mungkin ada di dalam kepala masing-masing individu dalam organisasi. Manajemen Pengetahuan merupakan upaya meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola aset intelektualnya: pengetahuan dan pengalaman yang ada, sehingga dapat dicapai suatu organisasi yang efektif dan efisien.

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari melalui website portal.kkp.go,id.

Sampai akhir triwulan III Tahun 2024, sistem penilaian manajemen pengetahuan yang terstandar level III mengadopsi langsung nilai capaian level atasannya yaitu Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP berdasarkan surat dari Plt. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan No. B.1962/BPPSDM.4/RC.610/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024 tentang capaian nilai akhir IKU MP terstandar lingkup KKP triwulan III 2024 yaitu sebesar 120,14%.

Tabel 18. Capaian Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar.

IKU-20. Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)									
Realisasi TW 3				TW 3 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
80	100	100	100	94	120,14	120 (127,81)	20,14	92	130,59

Capaian indikator ini telah mencapai 120,14% dari target yaitu 94%. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu triwulan III tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 20,14%. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian triwulan III tahun 2024 telah melebihi target dengan bilai capaian sebesar 130,59%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19. Perbandingan realisasi unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	94	120,14	120
2	BPPP Banyuwangi	94	120,14	120
3	BPPP Bitung	94	120,14	120
4	BPPP Ambon	94	120,14	120
5	BPPP Medan	94	120,14	120

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah tersedianya jaringan internet yang memadai dalam media yang *menshared* data sesuai dengan data yang di distribusikan dalam aplikasi *Portal Collaboration Office* dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan

Dengan adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan tersebut, maka BPPP ambon dapat melakukan Efisiensi anggaran terkait pemenuhan IKU ini, Subkoordinator Program dan Monev akan mengupload rekapan seluruh pejabat dan operator yang sudah memenuhi data pada aplikasi *Portal Collaboration Office* melalui WA grup yang dapat terbaca oleh seluruh pejabat dan operator untuk dapat ditindaklanjuti dengan segera.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, Subkoordinator Program dan Monev secara rutin merekap seluruh pejabat dan operator yang tergabung pada media aplikasi *Portal Collaboration Office* sebelum akhir bulan berjalan pada WA grup Balai dan mengingatkan kepada pejabat dan operator yang belum mengupload data agar dapat segera mengupload pada akun masing-masing.

Indikator Kinerja 21

Indeks profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks).

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB

No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai IKU ini diperoleh berdasarkan dashboard IP ASN pada laman https://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2023/unker/962?page=1. dan penilaiannya bersifat semesteran sehinga nilai pencapaiannya masih 0.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah komitmen seluruh pegawai di lingkup BPPP Ambon, operator simpeg dan pengelola kepegawaian lainnya. Untuk mendapatkan data-data terkini, masing-masing pegawai dapat mengunggah dokumen bukti diklat-diklat yang diikuti dan melakukan entri data diklat atau seminar yang diikuti, atau menyerahkan kepada operator simpeg untuk dilakukan entri data sehingga nilai kompetensi pegawai dapat sesuai. Media sosial *Whatsapp* menjadi salah satu alat komunikasi untuk penyampaian pemutakhiran data, dan memonitor pergerakan nilai sehingga target IKU ini dapat tercapai.

Peningkatan atau keberhasilan tercapaianya target Nilai IP ASN BPPP Ambon ini antara lain disebabkan oleh:

1. Terdapat pegawai lingkup BPPP Ambon yang mendapatkan peningkatan pendidikan, sehingga kualifikasi pendidikannya meningkat;
2. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan dan seminar daring;

3. Komitmen pimpinan dan kesadaran untuk meningkatkan kompetensi secara daring;
4. Kesadaran pegawai untuk menyampaikan sertifikat pengembangan kompetensi kepada pengelola kepegawaian; dan
5. Keaktifan pengelola kepegawaian dalam mengingatkan dan memutakhirkan data peningkatan kompetensi maupun pendidikan.

Indikator Kinerja 22

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-R Atas LK BPPP Ambon (%).

Merupakan indikator batas tertinggi presentase temuan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPPP Ambon dibandingkan realisasi tahun 2021.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2018, realisasi pada tahun 2018 sebesar 0 %, pada tahun 2019 juga sebesar 0%, pada tahun 2020 sebesar 0,01%, pada tahun 2022 sebesar 0,01% dan pada tahun 2022 sebesar 0%.

Salah satu untuk menciptakan pengelolaan yang bersih adalah pemeriksaan rutin oleh BPK. Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

IKU ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari BPPSDM KP yang dihitung akhir tahun 2024. Perhitungan ini berdasarkan total temuan nilai kepatuhan dibandingkan dengan pagu total yang bersifat minimize artinya semakin

kecil realisasi dibandingkan dengan target maka semakin besar pula nilai capaian kinerja yang diperoleh.

Proses penilaian IKU ini bersifat tahunan sehingga nilai capaiannya akan didapat pada akhir tahun 2024.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah tersedianya SOP terkait penggunaan anggaran yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan tersebut, progress capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, mengingat seluruh penggunaan anggaran yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh IKU yang merupakan IKU tahunan telah memiliki progress yang nantinya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2024

Indikator Kinerja 23

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon I lingkup KKP.

Cara perhitungan IKU ini dengan cara Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 70% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.

$$\% \text{ Rekomendasi} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen}}{\text{Jumlah Rekomendasi Yang Sudah Ditindaklanjuti Secara Tuntas}} \times 100\%$$

IKU ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari BPPSDM KP yang akan dihitung setiap triwulanan dan berdasarkan surat dari Sekertaris BPPSDM KP Nomor B.5406/BPPSDM.1/HP.510/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Capaian IKU Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan III Tahun 2024 Lingkup BPPSDM KP, BPPP Ambon memperoleh nilai sebesar 100% dari target triwulan III tahun 2024 sebesar 82%.

Tabel 22. Capaian Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon

IKU-23. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BPPP Ambon (%)									
Realisasi TW 3				TW 3 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0	0	100	100	82	100	120 (121,95)	0	80	125

Capaian indikator ini telah mencapai 100% dari target yaitu 82%. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu triwulan III tahun 2023, tidak terjadi perubahan. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian triwulan III tahun 2024 sebesar 125%.

Realisasi kinerja IKU ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 23. Perbandingan realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	82	100	120
2	BPPP Banyuwangi	82	100	120
3	BPPP Bitung	82	100	120
4	BPPP Ambon	82	100	120
5	BPPP Medan	82	82	100

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah tersedianya SOP terkait pengisian aplikasi SIDAK KKP yang merupakan bagian dari penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja.

Kegiatan strategis yang telah dilakukan adalah peningkata kompetensi operator yang menangani aplikasi SIDAK KKP sehingga progres capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, pengisian aplikasi SIDAK KKP sesuai dengan SOP turut memberikan kontribusi yang baik terhadap pemenuhan capaian IKU tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh IKU yang merupakan IKU tahunan telah memiliki progres yang nantinya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2024.

Indikator Kinerja 24

Penilaian Mandiri SAKIP Satker BPPP Ambon (Nilai)

Penilaian Mandiri SAKIP Satker dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Satker .

IKU ini merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2023, cara perhitungannya dengan menghitung nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri dari Tim SAKIP BPPSDM. Sampai pada akhir triwulan III tahun 2024, BPPP Ambon masih melakukan persiapan dokumen pendukung SAKIP dan sistem penilaiannya bersifat tahunan sehingga nilain pencapaiannya masih 0.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya aplikasi Kinerjaku yang telah memuat menu template penilaian mandiri SAKIP sehingga memudahkan dalam penyusunan dokumen penilaian mandiri SAKIP.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani SAKIP
2. Aplikasi Kinerjaku yang memuat menu tamplate penilaian mandiri SAKIP
3. Operator yang menangani penilaian mandiri SAKIP dan Kinerjaku masih petugas yang sama sehingga memudahkan pemahaman pemenuhan dokumen penilaian mandiri SAKIP BPPP Ambon.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM KP melalui kegiatan *Kick Off Meeting* Implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh BRSDM KP
2. Dokumen penilaian mandiri SAKIP telah disusun dari awal tahun sebagai dokumen persyaratan pemenuhan dokumen Kinerja per triwulan
3. Penyimpanan dokumen penilaian mandiri SAKIP terletak pada Google Drive milik BPPP Ambon

Indikator Kinerja 25

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPPP Ambon (nilai).

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 90,50%, tahun 2018 sebesar 86,83%, pada tahun 2019 sebesar 95,39%, tahun 2020 sebesar 92,83%, tahun 2021 sebesar 97,44% dan tahun 2022 sebesar 94,48%

Terdapat 12 indikator penilaian yaitu: Pengelolaan UP, Data Kontrak, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Hal III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian tagihan Rekon LPJ, Renkas, Realisasi, PAGU Minus dan Dispensasi SPM.

IKU ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari BPPSDM KP yang akan dihitung setiap triwulanan dan Proses penilaian IKU ini bersifat semesteran sehingga nilai capaiannya akan didapat pada akhir semester II tahun 2024.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah tersedianya SOP terkait pengisioan aplikasi OM SPAN yang merupakan bagian dari Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPPP Ambon.

Dengan adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan tersebut, progres capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, pengisian aplikasi OM SPAN oleh SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya turut memberikan kontribusi yang baik terhadap pemenuhan capaian IKU tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh IKU yang merupakan IKU tahunan telah memiliki progres yang nantinya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2024 serta melakukan harmonisasi operator OM SPAN dengan pihak KPPN terkait capaian output masing-masing kegiatan sehingga nilai capaian dapat 100% secara keseluruhan.

Indikator Kinerja 26

Nilai kinerja anggaran BPPP Ambon (nilai).

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 90,50%, tahun 2018 sebesar 86,83%, pada tahun 2019 sebesar 95,39%, pada tahun 2020 sebesar 92,03%, pada tahun 2021 sebesar 85,51% dan pada tahun 2022 sebesar 86,99%

Proses penilaian IKU ini bersifat tahunan sehingga nilai capaiannya akan didapat pada akhir tahun 2024.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah tersedianya SOP terkait pengisioan aplikasi SMART DJA yang merupakan bagian dari Nilai kinerja anggaran BPPP Ambon.

Dengan adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan tersebut, progres capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, pengisian aplikasi SMART DJA oleh SDM yang memiliki kompetensi

dibidangnya turut memberikan kontribusi yang baik terhadap pemenuhan capaian IKU tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh IKU yang merupakan IKU tahunan telah memiliki progres yang nantinya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2024.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Penyerapan anggaran BPPP Ambon pada Tanggal 30 September 2024, dapat dilihat pada tabel 26 berikut :

Tabel 26. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 30 September 2024

NO.	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	PROGRAM RISET SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**66.790.543.000**	**45.923.294.943**	**68,76**	**20.867.248.057**
1	2375.DCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (Base Line)	90.000.000	90.000.000	100,00	-
2	2375. QDD.001 Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapat pendampingan dan penyuluhan KP	6.071.340.000	4.042.228.843	66,58	2.029.111.157
3	2375. QDD.002 Masyarakat KP yang mendapatkan percontohan perikanan	2.145.000.000	230.110.000	10,73	1.914.890.000
4	2375. RAL Sarana Bidang kemaritiman, kelautan dan perikanan (Base Line)	596.892.000	596.852.550	99,99	39.450
5	2375. RBQ Prasarana bidang kemaritiman, kelautan dan perikanan (Base Line)	150.000.000	149.714.000	99,81	286.000
6	2375. SCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (Base Line)	5.553.448.000	2.907.117.661	52,35	2.646.330.339
7	2378. Layanan Dukungan Manajemen	460.311.000	220.014.594	47,80	240.296.406
8	001 Gaji dan Tunjangan	45.155.340.000	33.829.192.025	74,92	11.326.147.975
9	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.568.212.000	3.858.065.270	58,74	2.710.146.730

Secara umum kinerja BPPP Ambon pada triwulan III tahun 2024 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti sosialisasi kepada penyuluh PNS dan PPB Satminkal BPPP Ambon tentang

mekanisme pembayaran BOP sehingga anggaran BOP Penyuluh PNS dan PPB dapat dibayarkan penuh setiap bulannya.

Pemetaan anggaran pendukung indikator kinerja utama BPPP Ambon disajikan dalam bentuk sebagai berikut :

Tabel 27. Pemetaan anggaran pendukung indikator kinerja utama sampai dengan tanggal 30 September 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% REALISASI
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	19.600.000		0,00
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	5.553.448.000	2.823.138.451	50,84
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	456.824.000	181.262.917	39,68
		4	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Pelatihan Satker BPPP Ambon (Orang)	17.600.000		0,00
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	5	SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	90.000.000	90.000.000	100,00
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	6	Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	19.600.000		0,00
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Jumlah Peyuluh Perikanan PNS yang mengikuti Uji Kompetensi Satker BPPP Ambon (Orang)	17.000.000		0,00
		8	Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha yang disuluh di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	2.718.176.000	3.673.077.530	135,13
		9	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	1.175.000.000	153.820.213	13,09
		10	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	175.000.000	27.305.700	15,60
		11	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Penyuluhan Satker BPPP Ambon (Orang)	476.740.000	182.045.400	38,19
		12	Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	980.000.000	5.980.000	0,61
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di Satker BPPP Ambon (Desa)	1.310.000.000		0,00
		14	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	835.000.000	230.110.000	27,56
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	15	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	596.892.000	596.852.550	99,99
		16	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	150.000.000	149.714.000	99,81
7	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	17	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satker BPPP Ambon (Dokumen)	55.000.000		0,00
		18	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	45.155.340.000	33.829.192.025	74,92
		19	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	16.800.000	3.037.000	18,08
		20	Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	229.100.000	81.719.144	35,67
		21	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	6.568.212.000	3.858.065.270	58,74
		22	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-R atas LK BPPP Ambon (%)	39.200.000		0,00

		23	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	39.200.000		0,00
		24	Penilaian Mandiri SAKIP Satker BPPP Ambon (Nilai)	39.200.000	5.559.500	14,18
		25	Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran BPPP Ambon (nilai)	30.000.000		0,00
		26	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	27.611.000	32.415.243	117,40
			Total	**66.790.543.000**	**45.923.294.943**	**68,76**

3.4 Efisiensi Anggaran BPPP Ambon

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Penghitungan efisiensi anggaran dapat dilihat pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Dasar hukum terkait penghitungan efisiensi terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran.

Tabel 28. Nilai Efisiensi BPPP Ambon per masing-masing Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA		NILAI KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	%	NILAI EFISIENSI
1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	0	19.600.000		0,00	-
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	105,92	5.553.448.000	2.823.138.451	50,84	55,08
3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	120	456.824.000	181.262.917	39,68	80,32
4	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Pelatihan Satker BPPP Ambon (Orang)	0	17.600.000		0,00	-
5	SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	0	90.000.000	90.000.000	100,00	- 100,00
6	Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	0	19.600.000		0,00	-

7	Jumlah Peyuluh Perikanan PNS yang mengikuti Uji Kompetensi Satker BPPP Ambon (Orang)	0	17.000.000		0,00	-
8	Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha yang disuluh Satker BPPP Ambon (Kelompok)	120	2.718.176.000	3.673.077.530	135,13	- 15,13
9	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	116,68	1.175.000.000	153.820.213	13,09	103,59
10	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	120	175.000.000	27.305.700	15,60	104,40
11	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Penyuluhan Satker BPPP Ambon (Orang)	0	476.740.000	182.045.400	38,19	- 38,19
12	Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	0	980.000.000	5.980.000	0,61	- 0,61
13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di Satker BPPP Ambon (Desa)	0	1.310.000.000		0,00	-
14	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	0	835.000.000	230.110.000	27,56	- 27,56
15	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	0	596.892.000	596.852.550	99,99	- 99,99
16	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	0	150.000.000	149.714.000	99,81	- 99,81
17	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satker BPPP Ambon (Dokumen)	0	55.000.000		0,00	-
18	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	101,15	45.155.340.000	33.829.192.025	74,92	26,23
19	Nilai Rekonsilasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	0	16.800.000	3.037.000	18,08	- 18,08
20	Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	120	229.100.000	81.719.144	35,67	84,33
21	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)		6.568.212.000	3.858.065.270	58,74	- 58,74
22	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-R atas LK BPPP Ambon (%)	0	39.200.000		0,00	-
23	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	120	39.200.000		0,00	120,00
24	Penilaian Mandiri SAKIP Satker BPPP Ambon (Nilai)	0	39.200.000	5.559.500	14,18	- 14,18
25	Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran BPPP Ambon (nilai)	0	30.000.000		0,00	-
26	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	0	27.611.000	32.415.243	117,40	- 117,40
	Total	**106,12**	**66.790.543.000**	**45.923.294.943**	**68,76**	**37,36**

Efisiensi anggaran BPPP Ambon pada triwulan III Tahun 2024 memperoleh skor 37,36. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum dicapainya seluruh target IKU dikarenakan perhitungan masih dilakukan pada bulan September 2024.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Capaian Kinerja Utama

Pada akhir triwulan III tahun 2024, BPPP Ambon memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 8 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon triwulan tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key perfomance indikator)*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical framework* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPP Ambon sebesar 116,00%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:

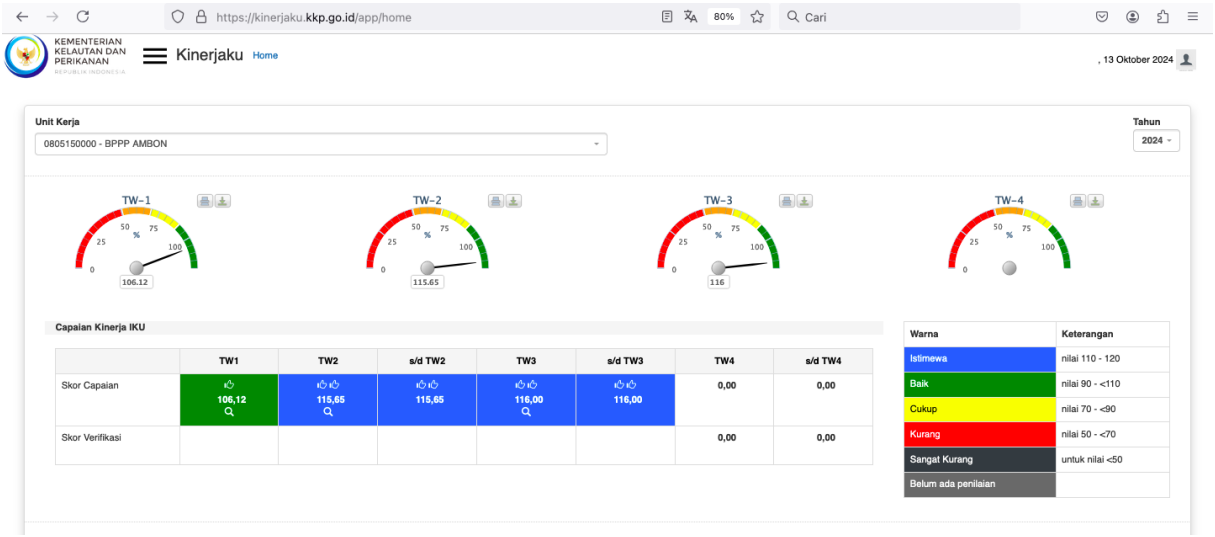

Gambar 20. Dashboard Kinerjaku Level 3 BPPP Ambon

Selama triwulan III tahun 2024, dari 8 IKU yang menjadi target triwulan III tahun 2024 BPPP Ambon dan semua telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan melebihi target yang telah ditetapkan.

Rincian target dan realiasi dari 8 IKU tersebut adalah:

Tabel 29. Capaian IKU BPPP Ambon triwulan III tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW 3	REALISASI TW 3	% REALISASI
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	72	0	0	0
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	3.302	2.398	2.540	105,92
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,682	0,20	2,82	120
		4	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Pelatihan Satker BPPP Ambon (Orang)	4	0	0	0
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	5	SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	150	0	0	0
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	6	Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	18	0	0	0
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Jumlah Peyuluh Perikanan PNS yang mengikuti Uji Kompetensi Satker BPPP Ambon (Orang)	2	0	0	0
		8	Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha yang disuluh Satker BPPP Ambon (Kelompok)	3.000	2.200	2.835	120
		9	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	90	60	70	116,68
		10	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	240	100	175	120
		11	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Penyuluhan Satker BPPP Ambon (Orang)	370	0	0	0
		12	Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	5	0	0	0
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di Satker BPPP Ambon (Desa)	2	0	0	0
		14	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	2	0	0	0
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	15	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1	0	0	0
		16	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1	0	0	0
7	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	17	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satker BPPP Ambon (Dokumen)	2	0	0	0
		18	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100	75	75,86	101,15
		19	Nilai Rekonsilasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	94	0	0	0
		20	Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94	94	120,14	120
		21	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	81			
		22	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-R atas LK BPPP Ambon (%)	≤ 0,5	0	0	0

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW 3	REALISASI TW 3	% REALISASI
		23	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	82	82	100	120
		24	Penilaian Mandiri SAKIP Satker BPPP Ambon (Nilai)	78	0	0	0
		25	Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran BPPP Ambon (nilai)	93,76	0	0	0
		26	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	82	0	0	0

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi rencana aksi triwulan III tahun 2024, IKU dengan Target Kinerja Tahunan yang diprediksi tidak tercapai target kinerjanya dikarenakan kurang termonitor setiap triwulannya. Maka dari itu Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* BPPP Ambon. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPP Ambon. Akhirnya, BPPP Ambon berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abubakar**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
Lilly Aprilya Pregiwati	**Abubakar**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	72
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	3.302
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,682
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	150
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	18
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BPPP Ambon (Kelompok)	3.000
		7	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Ambon (Kelompok)	90
		8	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BPPP Ambon (Kelompok)	240
		9	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPP Ambon (Orang)	370
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	10	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BPPP Ambon (Desa Perikanan Cerdas) (Desa)	2
		11	Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon (Kelompok)	2
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	12	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1
		13	Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1
7	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	14	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100
		15	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	94
		16	Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		17	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	81
		18	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon (%)	≤ 0,5
		19	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	82
		20	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)	78
		21	Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran BPPP Ambon (nilai)	93,76
		22	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	82

Data Anggaran

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pelatihan dan Penyuluhan KP	15.316.480.000
2	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM	51.765.651.000
Total Anggaran BPPP Ambon		**67.082.131.000**

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
Lilly Aprilya Pregiwati	**Abubakar**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAN www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abubakar**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 April 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Plt. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
Lilly Aprilya Pregiwati	**Abubakar**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	72
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	3.302
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,682
		4	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Pelatihan Satker BPPP Ambon (Orang)	4
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	5	SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	150
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan Kelautan dan Perikanan	6	Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	18
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1
		8	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1
5	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	9	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100
		10	Nilai Rekonsilasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	94
		11	Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		12	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	81
		13	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksanaan BPK-R atas LK BPPP Ambon (%)	≤ 0,5
		14	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	82
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker BPPP Ambon (Nilai)	78
		16	Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran BPPP Ambon (nilai)	93,76
		17	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	82

Data Anggaran

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	6.605.140.000
2	Program Dukungan Manajemen	52.183.863.000
	Total Anggaran Pelatihan BPPP Ambon	**58.789.003.000**

Jakarta, 3 April 2024

Pihak Kedua

Plt. Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon

Abubakar

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAN www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abubakar**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 April 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Plt. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
Lilly Aprilya Pregiwati	**Abubakar**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	72
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	3.302
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,682
		4	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Pelatihan Satker BPPP Ambon (Orang)	4
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	5	SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	150
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan Kelautan dan Perikanan	6	Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	18
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1
		8	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1
5	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	9	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100
		10	Nilai Rekonsilasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	94
		11	Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		12	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	81
		13	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksanaan BPK-R atas LK BPPP Ambon (%)	≤ 0,5
		14	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	82
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker BPPP Ambon (Nilai)	78
		16	Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran BPPP Ambon (nilai)	93,76
		17	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	82

Data Anggaran

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	6.605.140.000
2	Program Dukungan Manajemen	52.183.863.000
	Total Anggaran Pelatihan BPPP Ambon	**58.789.003.000**

Jakarta, 3 April 2024

Pihak Kedua

Plt. Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon

Abubakar

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAN www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abubakar**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Hendra Yusran Siry**
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Plt. Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
Hendra Yusran Siry	**Abubakar**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Penyuluh Perikanan PNS yang mengikuti Uji Kompetensi Satker BPPP Ambon (Orang)	2
		2	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh Satker BPPP Ambon (Kelompok)	3.000
		3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya di satker BPPP Ambon (Kelompok)	90
		4	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	240
		5	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Penyuluhan Satker BPPP Ambon (Orang)	370
		6	Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendapatkan Perizinan Berusaha di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	5
2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	7	Desa/Kawasan Mitra yang Menerapkan Iptek di Satker BPPP Ambon (Desa)	2
		8	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	2
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	9	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satker BPPP Ambon (Dokumen)	2

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6.071.340.000
2	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM KP	2.640.000.000
Total Anggaran BPPP Ambon		**8.711.340.000**

Jakarta, April 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Plt. Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
Hendra Yusran Siry	**Abubakar**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
JALAN MARTHA ALFONS, POKA, TELUK AMBON KODE POS 97233
TELEPON (0911) 322710, FAKSIMILE (0911) 322711)
LAMAN : www.bp3ambon-kkp.org , Email : bppp_ambon@kkp.go.id

SURAT TUGAS
Nomor : B. 16/BPPP.AMB/KP.440/I/2024

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab yang dibebankan kepada BPPP Ambon secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk memberi penugasan kepada Personil Pengumpul Data Kinerja di BPPP Ambon T.A 2024;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam surat tugas ini dianggap mampu memenuhi syarat untuk diberikan tugas sebagai Personil Pengumpul Data Kinerja pada BPPP Ambon T.A 2024;
3. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja BPPP Ambon Nomor : SP DIPA-032.12.2.238755/2024 tanggal 24 November 2023.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/A1/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/LL/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 87/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

Memberi Tugas

Kepada :

No.	Nama/NIP/ Pangkat/Golongan/Jabatan	Jabatan dalam penugasan	Uraian Tugas / Keterangan
1.	Abubakar, S.St.Pi, M.Si 19780427 200312 1 001 Pembina IV/a Kepala Balai	Penanggung Jawab	- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan - Memberikan arahan dan petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan
2.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si 19771101 200312 2 004 Pembina IV/a Analis Perencana Muda	Ketua	Bertanggungjawab atas data kinerja yang dikumpulkan
3.	Moh. Arief Hidayat, A.Md,S.Pi 19870216 201012 1 002 Penata Muda Tk.I III/b Instruktur Pertama	Anggota (Pokja Dukungan Manajerial)	- Mengumpulkan dan merekap data kinerja pada subkoordinator program dan monev yang trekait dengan data dukung capaian indikator kinerja : a. Lulusan pelatihan yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon b. Presentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BPPP Ambon c. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon d. Presentase unit kerja yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon Data yang dikumpulkan paling lambat tanggal 2 setiap Bulan
4.	Rachel L. Wattimena, S.Pi, M.Si 19730531 200604 2 007 Penata Tk.I III/d Instruktur Muda	Anggota (Pokja Sarpras dan PNBP)	Mengumpulkan dan merekap data kinerja pada subkoordinator Tata Usaha yang trekait dengan data dukung capaian indikator kinerja :

No.	Nama/NIP/ Pangkat/Golongan/Jabatan	Jabatan dalam penugasan	Uraian Tugas / Keterangan
			a. Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon b. Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon c. Indeks profesionalitas ASN lingkup BPPP Ambon d. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon e. Batas tertinggi presentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon dibandingkan realisasi anggaran BPPP Ambon TA. 2023 f. Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon Data yang dikumpulkan paling lambat tanggal 2 setiap Bulan
5.	Johanna L. Thenu, S.Pi, MP 19770415 200502 2 001 Penata Tk.I III/d WI Ahli Muda	Anggota (Pokja Pelatihan)	Mengumpulkan dan merekap data kinerja pada subkoordinator Pelatihan yang trekait dengan data dukung capaian indikator kinerja : a. Lulusan pelatihan yang membentuk rintisan usaha baru di BPPP Ambon b. SDM KP yang dilatih di BPPP Ambon c. Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat Berbasis “Full Online Training” di BPPP Ambon d. Tersedianya materi pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Ambon e. Sertifikasi kelembagaan Pelatihan dan

			Penyuluhan sesuai standar Lembaga f. Data yang dikumpulkan paling lambat tanggal 2 setiap bulan
6.	Arianto Doha 19790616 200701 1 003 Penata Muda III/a Pengelola Data	Anggota (Pokja Penyuluhan)	Mengumpulkan dan merekap data kinerja pada subkoordinator Penyuluhan yang trekait dengan data dukung capaian indikator kinerja : a. Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh di Satminkal di BPPP Ambon b. Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Ambon c. Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan di Satminkal BPPP Ambon d. Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan IPTEK KP di BPPP Ambon e. Percontohan penyuluhan KP yang diterapkan di Satminkal BPPP Ambon Data yang dikumpulkan paling lambat tanggal 2 setiap bulan.

Untuk : 1. Sebagai Personil Pengumpul Data Kinerja BPPP Ambon Tahun 2024;
2. Melaksanakan tugas mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Biaya : DIPA BPPP Ambon.

Ambon, 2 Januari 2024
Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon,

Abubakar, S.St.Pi.,M.Si

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
JALAN MARTHA ALFONS, POKA, TELUK AMBON KODE POS 97233
TELEPON (0911) 322710, FAKSIMILE (0911) 322711)
LAMAN : www.bp3ambon-kkp.org , Email : bppp_ambon@kkp.go.id

SURAT TUGAS
Nomor : B. 17/BPPP.AMB/KP.440/I/2024

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon, perlu membentuk tim teknis tata kelola kinerja di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, perlu memberi penugasan kepada Tim Teknis Tata Kelola Kinerja di Lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon;
3. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja BPPP Ambon Nomor : SP DIPA-032.12.2.238755/2024 tanggal 24 November 2023.

Dasar :

1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang KementerianKelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114.

Memberi Tugas

Kepada :

Penanggung Jawab				
No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan dalam penugasan
1	2	3	4	
1.	Abubakar, S.St.Pi, M.Si	19780427 200312 1 001 Pembina IV/a	Kepala Balai	Pengarah
2.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Perencana Ahli Muda	Penanggung Jawab Tata Kelola Kinerja Manajerial
3.	Ekadasa Priantara, ST, M.Si	19710228 200212 1 002 Pembina IV/a	Instruktur Ahli Muda	Penanggung Jawab Tata Kelola Bidang Pelatihan
4.	A.R Sopaheluwakan, S.Pi, M.Si	19770605 200701 2 003 Pembina IV/a	Analis Kepegawaian Muda	Penanggung Jawab Tata Kelola Bidang Penyuluhan
5.	Rachel L. Wattimena,S.Pi, M.Si	19730531 200604 2 007 Penata Tk.I III/d	Instruktur Ahli Muda	Penanggung Jawab Tata Kelola Bidang Sarana dan Prasarana dan PNBP
Tim Pelaksana Kesekretariatan				
No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan dalam penugasan
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Perencana Ahli Muda	Ketua
2.	Moh. Arief Hidayat, A.Md,.S,Pi	19870216 201012 1 002 Penata Muda Tk.I III/b	Instruktur Pertama	Sekretaris
3.	Dessy Rompis, S.AP	19791222 200312 2 005 Penata Muda III/a	Pengelola Rencana Program dan Kegiatan	PelaksanaDukungan Manajerial/Manajer Kinerja
4.	Fiona A.B Nikyuluw, S.Pi, M.Si	19750205 200212 2 004 Pembina IV/a	Instruktur Madya	PelaksanaDukungan Manajerial/Manajer Kinerja
5.	Wahyu Retno Aris, S.St.Pi	19840530 201503 1 001 Penata Muda Tk.I III/b	Instruktur Pertama	PelaksanaDukungan Manajerial/Manajer Kinerja
6.	La Tati	19680423 199203 1 001 Penata Muda Tk.I / IIIb	Pengadm. Persuratan	Pelaksana Sarpras dan PNBP/Manajer Kinerja
7.	Polly S.B Christian, S.St.Pi,M.Si	19770608 200312 1 004 Penata Tk.I III/d	Instruktur Muda	Pelaksana Pelatihan /Manajer Kinerja
8.	Drs. Yohanis Setitit	19660612 200212 1 001 Penata Tk.I / IIId	Pengelola Data	Pelaksana Penyuluhan/Manajer Kinerja

Sub-Tim Perencanaan Kinerja				
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Perencana Ahli Muda	Koordinator
2.	Rachel L. Wattimena,S.Pi, M.Si	19730531 200604 2 007 Penata Tk.I III/d	Instruktur Ahli Muda	Anggota
3.	Ekadasa Priantara, ST, M.Si	19710228 200212 1 002 Pembina IV/a	Instruktur Ahli Muda	Anggota
4.	A.R Sopaheluwakan, S.Pi, M.Si	19770605 200701 2 003 Pembina IV/a	Analis Kepegawaian Muda	Anggota
Sub-Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja				
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Perencana Ahli Muda	Koordinator
2.	Moh. Arief Hidayat, A.Md,.S,Pi	19870216 201012 1 002 Penata Muda Tk.I III/b	Instruktur Pertama	Anggota
3.	Dessy Rompis, S.AP	19791222 200312 2 005 Penata Muda III/a	Pengelola Rencana Program dan Kegiatan	Anggota
4.	Fiona A.B Nikyuluw, S.Pi, M.Si	19750205 200212 2 004 Pembina IV/a	Instruktur Madya	Anggota
5.	Wahyu Retno Aris, S.St.Pi	19840530 201503 1 001 Penata Muda Tk.I III/b	Instruktur Pertama	Anggota
Sub-Tim Evaluasi Kinerja				
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Perencana Ahli Muda	Koordinator
2.	Moh. Arief Hidayat, A.Md,.S,Pi	19870216 201012 1 002 Penata Muda Tk.I III/b	Instruktur Pertama	Anggota
3.	Dessy Rompis, S.AP	19791222 200312 2 005 Penata Muda III/a	Pengelola Rencana Program dan Kegiatan	Anggota
4.	Fiona A.B Nikyuluw, S.Pi, M.Si	19750205 200212 2 004 Pembina IV/a	Instruktur Madya	Anggota
5.	Wahyu Retno Aris, S.St.Pi	19840530 201503 1 001 Penata Muda Tk.I III/b	Instruktur Pertama	Anggota
6.	Rachel L. Wattimena, S.Pi, M.Si	19730531 200604 2 007 Penata Tk.I III/d	Instruktur Muda	Anggota
7.	Johanna L. Thenu, S. Pi, MP	19770415 200502 2 001 Penata Tk.I III/d	WI Muda	Anggota
8.	Frajaya Ranto Dame, SE, M.Si	19641229 199403 1 001 Pembina Tk. I IV/b	WI Madya	Anggota
Sub-Tim Verifikasi Kinerja				
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Perencana Ahli Muda	Koordinator
2.	Moh. Arief Hidayat, A.Md,.S,Pi	19870216 201012 1 002 Penata Muda Tk.I III/b	Instruktur Pertama	Anggota
3.	Murni Samin	19771020 200604 2 009 Penata Muda III/a	Pengelola Kepegawaian	Anggota

4.	Rizky Irawan Attamimi, S.Kom	-	Tenaga Teknis	Anggota
5.	Soraya, S.Pi	-		Anggota

Untuk : 1. Sebagai tim teknis tata kelola kinerja BPPP Ambon Tahun 2024 (daftar penugasan terlampir);
2. Melaksanakan tugas mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Biaya : DIPA BPPP Ambon.

Ambon, 2 Januari 2024
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon,

Abubakar, S.St.Pi.,M.Si

Lampiran I : Surat tugas Tim Teknis Tata Kelola Kinerja
BPPP Ambon
Nomor : B. 17/BPPP.AMB/KP.440/I/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

DAFTAR PENUGASAN TIM TEKNIS TATA KELOLA KINERJA
BPPP AMBON TAHUN 2024

No.	Jabatan dalam penugasan	Detail tugas
1	2	3
1.	Pengarah	Memberikan arahan dan bimbingan kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis dalam rangka pelaksanaan tata kelola kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon.
2.	Penaggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap tata kelola kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon.
3.	Pelaksana	Ketua: Melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon. Sekretaris: Memberikan dukungan teknis dan administrative kepada Tim Teknis Tata Kelola Kinerja BPPP Ambon. Manajer Kinerja: Mengkoordinasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja di lingkungan unit kerja yang bersangkutan untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan Koordinator Sub-Tim: Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kegiatan Sub-Tim serta melaporkan hasil kepada Ketua Tim Pelaksana Kesekretariatan
4.	Sub-Tim	Sub-Tim Perencanaan Kinerja 1) Memastian bahwa a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) / Rencana Kerja telah tersusun memuat : 1. Visi, Misi, dan Program; 2. Tujuan yang berorientasi hasil, indicator kinerja tujuan, dan target; 3. Sasaran yang berorientasi hasil, indicator kinerja sasaran, dan target tahunan; serta Indikator Kinerja Utama (IKU).

		b. Indikator Kinerja : 1. Digunakan sebagai ukuran kinerja secara formal, baik indicator kinerja level III; 2. Indikator Kinerja eselon III telah selaras dengan IKU; 3. Indikator Kinerja memenuhi kriteria SMART-C;dan 4. Ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit organisasi. c. Dokumen kontrak kinerja memuat : 1. Perjanjian Kinerja (PK): i. Tersusun dan selaras dengan dokumen Renstra dan PK atasannya; ii. Memuat target kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan;dan iii. Dilengkapi dengan matrik cascading untuk pedoman penyusunan PK level dibawahnya. 2. Peta strategi; 3. Rincian target IKU secara bulanan / triwulanan / semesteran / tahunan yang memuat metode perhitungan masing-masing IKU; 4. Matriks cascading kinerja organisasi level III 5. Pohon kinerja level III 6. Inisiatif strategi/rencana aksi atas PK. 2) Memastikan bahwa rencana aksi atas kinerja telah tersusun dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan; 3) Memastikan seluruh sasaran strategi, indikator kinerja, target, dan rencana aksi diinput kedalam system aplikasi pengelolaan kinerja;dan 4) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing - Sub-Tim Pengukuran Kinerja 1) Menyusun pedoman / mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja; 2) Melaksanakan pengukuran capaian IKU dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (bulanan/triwulan/semesteran/tahunan); 3) Memastikan seluruh ahsil pengukuran capaian IKU dan rencana aksi diinput kedalam system aplikasi pengelolaan kinerja;dan 4) Mengkoordinasikan proses pengukuran kinerja secara berjenjang pada unit organisasi amsing-masing. - Sub-Tim Pelaporan Kinerja 1) Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan Laporan Kinerja (LKj) secara berkala (bulanan/triwulanan/semesterab/tahunan).

		2) Memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku; 3) Memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan; 4) Memastikan LKj yang disusun dismapikan tepat waktu dan di unggah ke dalam website resmi;dan 5) Mengkoodinasikan proses pelaporan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing. - Sub-Tim Evaluasi Kinerja 1) Melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja; 2) Menyusun laporan hasil evaluasi program yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan, pengendalian, dan peningkatan kinerja selanjutnya; 3) Melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan pada unit kerja di masing-masing sesuai ketentuan; 4) Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan;dan 5) Mengkoordinasikan proses evaluasi kinerja secara berjenjang pada unit ogranisasi masing-masing. - Sub-Tim Verifikasi Kinerja 1) Melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil perencanaan kinerja; 2) Melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil pengukuran kinerja; 3) Melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil pelaporan kinerja; 4) Memastikan seluruh softcopy data, informasi, dan dokumen hasil perencanaa, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan disampaikan pada sistem dokumentasi online;dan 5) Mengkoordinasikan proses verifikasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.

Ambon, 2 Januari 2024
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon,

Abubakar, S.St.Pi.,M.Si

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

BPPP AMBON